



Kemendikdasmen
BPMP Sumsel

2026

LAPORAN KEUANGAN

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEMESTER 1 PERIODE 30 JUNI 2026

BPMP
Provinsi
Sumatera Selatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Raya Lintas Timur KM.36, Indralaya Mulya, Indralaya, Ogan Ilir, 30862



Kemendikdasmen
BPMP Sumsel

2026

LAPORAN KEUANGAN

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEMESTER 1 PERIODE 30 JUNI 2026

BPMP
Provinsi
Sumatera Selatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Jalan Raya Lintas Timur KM.36, Indralaya Mulya, Indralaya, Ogan Ilir, 30862

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan entitas baru dari Bagian Anggaran 138 dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih. Sebagai entitas Akuntansi, BPMP Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Inderalaya, 24 Juli 2026

Kepala,



Tajuddin Idris, S.Si., M.T.
NIP. 197203302002121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
N E R A C A.....	4
LAPORAN OPERASIONAL.....	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
A.4. Basis Akuntansi.....	12
A.5. Dasar Pengukuran.....	12
A.6. Kebijakan Akuntansi	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1. Pendapatan	21
B.2. Belanja	21
B.3. Belanja Pegawai	22
B.4. Belanja Barang	23
B.5. Belanja Modal	24
B.6. Belanja Bantuan Sosial	25
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	26
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	26
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	26
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	27
C.4. Belanja Dibayar Dimuka.....	27
C.5. Persediaan.....	27

C.6. Tanah	27
C.7. Peralatan dan Mesin	28
C.8. Gedung dan Bangunan.....	29
C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	29
C.10. Aset Tetap Lainnya	29
C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	30
C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.13. Aset Tak Berwujud.....	31
C.14. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	31
C.15. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.16. Uang Muka dari KPPN	32
C.17. Pendapatan Diterima Dimuka	32
C.18. Beban yang Masih Harus Dibayar	33
C.19. Ekuitas	33
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	34
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	34
D.2. Beban Pegawai.....	34
D.3. Beban Persediaan	35
D.4. Beban Barang dan Jasa	35
D.5. Beban Pemeliharaan.....	35
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	36
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	36
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	36
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	37
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	37
D.11. Kegiatan Non Operasional.....	37
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	39
E.1. Ekuitas Awal.....	39
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	39
E.3. Transaksi Antar Entitas.....	39
E.4. Ekuitas Akhir	40

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	41
F.1. Temuan dan Tindak Lanjut BPK.....	41
F.2. Rekening Pemerintah.....	41
F.3. Struktur Pejabat Perbendaharaan.....	41
F.4. Catatan Penting Lainnya	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran	3
Tabel 2. Neraca	4
Tabel 3. Laporan Operasional	5
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas	6
Tabel 5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2025	20
Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	22
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja	22
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai	23
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang	23
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal	24
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	26
Tabel 15. Rincian Belanja dibayar dimuka	27
Tabel 16. Rincian Persediaan	27
Tabel 17. Rincian Tanah	28
Tabel 18. Rincian Peralatan dan Mesin	28
Tabel 19. Rincian Gedung dan Bangunan	29
Tabel 20. Rincian Jalan dan Irigasi	29
Tabel 21. Rincian Aset tetap lainnya	30
Tabel 22. Rincian Akumulasi Aset Tetap Lainnya	30
Tabel 23. Rincian Aset Tak Berwujud	31
Tabel 24. Rincian Akumulasi dan Penyusutan dan Amortasi Aset lainnya	31
Tabel 25. Rincian Utang Pihak Ketiga	32
Tabel 26. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	34
Tabel 27. Rincian Beban Pegawai	34
Tabel 28. Rincian Beban Persediaan	35
Tabel 29. Rincian Beban Barang dan Jasa	35
Tabel 30. Rincian Beban Pemeliharaan	36
Tabel 31. Rincian Beban Perjalanan Dinas	36
Tabel 32. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	28



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Inderalaya, 24 Juli-2026

Kepala,



Tajuddin Idris, S.Si., M.T.

NIP. 197203302002121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 BPMP Provinsi Sumatera Selatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 204.327.999 atau mencapai 252,26% persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp81.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Keuangan Semester I TA 2024 adalah sebesar Rp 13.231.479.797 atau mencapai 51,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp25.613.852.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode 30 Juni 2026 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2025 Audited.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 87.171.891.661 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp173.573.680 ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 86.998.317.981 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar 0 . Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 554.806.777 dan Rp 86.617.084.884 .

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 40.628.000 ,sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 14.860.317.685 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp 14.819.689.685 . Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar Rp 163.699.999 , sedangkan Pos-Pos Luar Biasa surplus/defisit sebesar Rp - sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp 14.655.989.686.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp 88.255.619.266 ,Defisit-LO sebesar -Rp 14.655.989.686 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp - dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 13.017.455.304 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp 86.617.084.884 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 dan 30 JUNI 2025

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Catatan	30 Juni 2026			30 Juni 2025
		Anggaran	Realisasi	% Real. Anggaran	Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	81.000.000	204.327.999	252,26	37.052.000
Jumlah Pendapatan		81.000.000	204.327.999	252,26	37.052.000
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	14.939.789.000	7.030.153.094	47,06	5.500.796.859
Belanja Barang	B.4	10.674.063.000	6.201.326.703	58,10	3.721.760.921
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
Jumlah Belanja		25.613.852.000	13.231.479.797	51,66	9.222.557.780

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

NERACA

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

PER 30 JUNI 2026 dan 30 JUNI 2025

Tabel 2. Neraca

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Di Bendahara Pengeluaran	C.1	105.000.000	213.580.100
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	1.410.876	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.3	0	0
Persediaan	C.4	67.162.804	488.366.787
JUMLAH ASET LANCAR		173.573.680	701.946.887
ASET TETAP			
Tanah	C.5	43.475.010.000	43.475.010.000
Peralatan dan Mesin	C.6	9.219.042.511	10.899.208.095
Gedung dan Bangunan	C.7	55.895.446.223	55.639.736.223
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.8	628.742.000	884.452.000
Aset Tetap Lainnya	C.9	161.851.768	161.851.768
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.10	(22.381.774.521)	(22.003.999.664)
JUMLAH ASET TETAP		86.998.317.981	89.056.258.422
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	0	0
Aset Lain-lain	C.12	342.000.000	45.730.000
AKUMULASI PENYUSUTAN /AMORTISASI ASET LAINNYA	C.13	(342.000.000)	(45.730.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		87.171.891.661	89.758.205.309
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	449.506.777	418.814.351
Utang yang belum ditagihkan	C.15	300.000	11.687.780
Uang Muka dari KPPN	C.16	105.000.000	213.580.100
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		554.806.777	644.082.231
JUMLAH KEWAJIBAN		554.806.777	644.082.231
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	86.617.084.884	89.114.123.078
JUMLAH EKUITAS		86.617.084.884	89.114.123.078
JUMLAH EKUITAS		86.617.084.884	89.114.123.078
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		87.171.891.661	89.758.205.309

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

LAPORAN OPERASIONAL

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 dan 30 JUNI 2025

Tabel 3. Laporan Operasional

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	40.628.000	24.065.000
Jumlah Pendapatan Operasional		40.628.000	24.065.000
Beban Operasional			
Beban Pegawai	D.2	7.469.963.377	5.867.129.049
Beban Persediaan	D.3	215.261.601	30.126.752
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.804.350.815	1.433.448.424
Beban Pemeliharaan	D.5	689.308.153	962.939.527
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.530.294.545	1.295.302.598
Beban Barang Untuk Diserahkan Masyarakat	D.7	70.802.600	96.840.345
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.080.336.594	1.136.048.910
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Jumlah Beban Operasional		14.860.317.685	10.821.835.605
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(14.819.689.685)	(10.797.770.605)
Kegiatan Non Operasional			
Pelepasan Aset Non Lancar		163.699.999	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	163.699.999	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0
Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	12.987.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	0	12.987.000
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		163.699.999	12.987.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		163.699.999	12.987.000
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa			
Surplus/Defisit LO		(14.655.989.686)	(10.784.783.605)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 dan 30 JUNI 2025

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E.1	88.255.619.266	0
Surplus/Defisit LO	E.2	(14.655.989.686)	(10.784.783.605)
Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nilai Persediaan		0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0	0
Koreksi Lain-Lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E.3	13.017.455.304	99.898.906.683
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(1.638.534.382)	89.114.123.078
Ekuitas Akhir	E.4	86.617.084.884	89.114.123.078

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.05/2017 Tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;

26. PER-8/PB/2023 – Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan asset pada masa transisi di lingkungan Kementerian dan Lembaga;
28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 217/PMK.05 /2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 3 Juli 2026, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester 1 Tahun 2026;
35. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14530/A.A2/KU.03.02/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang Langkah-Langkah dan Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikdasmen Semester 1 Tahun 2026.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PAUD Diknas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah, BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang semula menjadi Bagian Anggaran 023 mulai 1 Januari 2025 beralih menjadi Bagian Anggaran 138.

Lokasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan berada di Jalan Lintas Timur KM. 36 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, berdiri diatas tanah seluas 25.776 m2.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang merupakan perubahan dari Balai Penataran Guru (BPG) Palembang. Sejalan dengan perkembangan jaman dan tuntutan akan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional melakukan restrukturisasi, dimana Balai Penataran Guru di seluruh Indonesia dialihfungsikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Hal ini ditandai dengan turunnya SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004 tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas menjadi penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Selanjutnya mulai tanggal 13 Februari 2007, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan direfungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Refungsionalisasi tersebut dimaksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat secara nasional sesuai dengan standar nasional pendidikan. Serta yang terakhir dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, maka per Juli tahun 2022 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan adanya perubahan nomenklatur Lembaga juga mengalami perubahan tugas dan fungsi dimana yang utamanya adalah penambahan fungsi Paud Dikmas yang sebelumnya dilaksanakan oleh BP Paud dan Dikmas.

Pada awal berdirinya, BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara teknis dikoordinasikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 disebutkan bahwa LPMP berada dibawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Tahun 2010 LPMP

berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 37 Tahun 2012 yang kemudian dirubah dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPMP merevisi tugas pokok dan fungsi BPMP yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2016, mengikuti perubahan struktur organisasi KemENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2016, BPMP berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan dimana berdasarkan Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 berubah Kembali menjadi Direktorat jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Dinamika regulasi terakhir yaitu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan berubah nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Saat ini BPMP Provinsi Sumatera Selatan di pimpin oleh Tajuddin Idris, S.Si., M.T.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan diproses melalui Aplikasi SAKTI dan disajikan melalui MonSAKTI (Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) secara lengkap, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran atas Laporan Barang Milik Negara (CaBMN).

A.4. Basis Akuntansi

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, entitas menggunakan dua macam aplikasi, yaitu SAIBA dan Aplikasi SIMAK-BMN. Dan Mulai Tahun 2023 kedua aplikasi tersebut diintegrasikan pada aplikasi web, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Modul Persediaan, Modul Aset dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP).

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. Aset

Aset diklasifikasi menjadi asset lancar, aset tetap, piutang jangka Panjang dan aset lainnya

A.6.5.1 Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga perolehan terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2 Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

A.6.5.3 Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

A.6.5.4 Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan Cadangan pemerintah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPMP Provinsi Sumatera Selatan Memperoleh alokasi anggaran DIPA Awal Tahun 2026 sebesar Rp 34.594.822.000 dengan Nomor DIPA SP DIPA 138.04.2.693243/2026 Tanggal 1 Desember 2025. Selama periode berjalan Semester I Tahun 2025 BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan revisi atas DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2025

Uraian	30 Juni 2026	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	81.000.000	81.000.000
Penerimaan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	81.000.000	81.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	14.939.789.000	14.939.789.000
Belanja Barang	19.655.033.000	10.674.063.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	34.594.822.000	25.613.852.000

Sampai dengan periode 30 Juni Tahun 2025 DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami revisi sebanyak 10 revisi, dengan rician sebagai berikut:

1. Revisi Ke-1 pada Tanggal 24 Desember 2025 merupakan revisi efisiensi anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
2. Revisi Ke-2 Tanggal 25 Januari 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
3. Revisi Ke-3 Tanggal 13 Februari 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
4. Revisi Ke-4 Tanggal 20 Februari 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
5. Revisi Ke-5 Tanggal 5 Maret 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
6. Revisi Ke-6 Tanggal 25 Maret 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
7. Revisi Ke-7 Tanggal 13 April 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
8. Revisi Ke-8 Tanggal 26 April 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
9. Revisi Ke-9 Tanggal 11 Mei 2026, Revisi Pemutakhiran POK.
10. Revisi Ke-10 Tanggal 20 Mei 2026, Revisi Pemutakhiran POK.

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 204.327.999 atau mencapai 252,26% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 81.000.000 . Pendapatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2026		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	81.000.000	204.327.999	252,26%
Pendapatan Lain-Lain	0	0	-
Jumlah	81.000.000	204.327.999	252,26%

Realisasi pendapatan pada Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 451,46% dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan penyewaan fasilitas sarana dan prasarana ruang kelas, asarama dan aula oleh organisasi kemasyarakatan maupun secara individu. Kenaikan ini di pengaruhi oleh transaksi Lelang kendaraan dinas berupa 1 unit mobil merk Isuzu Nomor Polisi BG 8071 TZ Tahun 2007.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	204.327.999	24.065.000	749,07%
Pendapatan Denda	0	0	0%
Pendapatan Lain-Lain	0	12.987.000	-100,00%
Jumlah	204.327.999	37.052.000	451,46%

B.2. Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 13.231.479.797 atau 51,66% dari anggaran belanja sebesar Rp 25.613.852.000 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada Keuangan Per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	30 Juni 2026		% Real. Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	14.939.789.000	7.039.849.588	47,12%
Belanja Barang	10.674.063.000	6.201.326.703	58,10%
Belanja Modal	0	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Realisasi Belanja Kotor	25.613.852.000	13.241.176.291	51,70%
Pengembalian Belanja		9.696.494	-
Realisasi Belanja Netto	25.613.852.000	13.231.479.797	51,66%

Realisasi belanja Pada Semester I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.13.231.479.797 mengalami kenaikan sebesar 43,47% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada penambahan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 30 orang dan peningkatan pelaksanaan kegiatan pada periode semester I Tahun 2026.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja

Uraian	Realisasi		Naik Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Belanja Pegawai	7.030.153.094	5.500.796.859	27,80%
Belanja Barang	6.201.326.703	3.721.760.921	66,62%
Belanja Modal	0	0	
Belanja Bantuan Sosial	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	13.231.479.797	9.222.557.780	43,47%

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Keuangan Per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 7.030.153.094 dan Rp 5.500.796.859 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.435.733.812	3.160.912.184	8,69%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	761.078.670	0	
Belanja Lembur	0	0	
Belanja Tunj. Khusus & Transito	2.833.340.612	2.339.884.675	21,09%
Jumlah Realisasi Belanja	7.030.153.094	5.500.796.859	27,80%

Realisasi belanja Pegawai Pada Semester I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 7.030.153.094 belum bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya, Hal ini disebabkan karena ada penambahan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 30 orang.

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada Keuangan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 6.201.326.703 dan Rp 3.721.760.921 .

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Belanja Barang Operasional	726.814.787	827.762.523	-12,20%
Belanja Barang Non Operasional	1.255.232.060	254.192.600	393,81%
Belanja Barang Persediaan	244.660.321	128.746.177	90,03%
Belanja Jasa	1.822.303.968	320.965.521	467,76%
Belanja Pemeliharaan	622.321.022	894.791.502	-30,45%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.529.994.545	1.295.302.598	18,12%
Jumlah Realisasi Belanja	6.201.326.703	3.721.760.921	66,62%

Realisasi belanja Barang Pada Semester I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 6.201.326.703 mengalami kenaikan sebesar 66,62% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kuantitas pelaksanaan kegiatan dan belanja barang lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	0	0	

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp-. Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 tidak mengalami perubahan atau - dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena mulai tahun sebelumnya hingga dengan tahun ini tidak ada transaksi terkait belanja modal tanah di BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Per 30 Juni 2026 tidak ada perubahan sebesar Rp - atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi		Naik Turun
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Realisasi Belanja	0	0	

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Keuangan Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Keuangan Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Keuangan Per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00%. dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Keuangan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Keuangan Per 30 Juni 2026 tidak mengalami

perubahan atau sebesar Rp - dan Rp - . dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 adalah Rp105.000.000 dan Rp 0. Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Uang di Rekening	104.812.686	161.114.288
Uang Tunai	187.000	40.778.000
Kuitansi UP/TUP	0	11.687.812
Uang Muka	0	0
Jumlah	104.999.686	213.580.100

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Nihil. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. BPMP Provinsi Sumatera Selatan bukan merupakan satker PNBPN fungsional di Kemendikdasmen, sehingga seluruh penerimaan PNBPN yang berasal dari hasil sewa peralatan, Gedung dan bangunan langsung disetorkan ke kas Negara dengan sebelumnya mendaftarkan pada aplikasi SIMPONI.

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp - dan Rp -. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP.

C.4. Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp - dan Rp -. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 15. Rincian Belanja dibayar dimuka

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Piutang bukan pajak	0	0
Jumlah	0	0

C.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp67.162.804 dan Rp488.366.787 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Barang Konsumsi	35.806.554	76.170.609
Barang untuk Pemeliharaan	5.992.750	66.796.064
Suku Cadang	0	0
Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	25.363.500	0
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Persediaan Bahan Lainnya	0	0
Jumlah	67.162.804	142.966.673

C.6. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPMP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp - dan Rp -. Tanah yang dimiliki terletak di Jalan Lintas Timur KM. 36 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	43.475.010.000
Mutasi Tambah	43.475.010.000
Transfer Masuk	43.475.010.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	43.475.010.000

Rincian saldo Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	5576 m2	Inderalaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan	
2.	20200 m2	Inderalaya Kab. Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan	43.475.010.000
Jumlah			43.475.010.000

C.7. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 9.219.042.511 dan Rp 10.899.208.095 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	10.899.208.095
Mutasi Tambah	10.899.208.095
Transfer Masuk	10.899.208.095
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
Saldo per 30 Juni 2026	21.798.416.190
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-8.074.908.004
Nilai Buku per 30 Juni 2026	13.723.508.186

Mutasi Tambah berupa transfer masuk dari satker BPMP Provinsi Sumatera Selatan Bagian Anggaran 023 yang telah dilikuidasi karena dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih.

C.8. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 55.895.446.223 dan Rp 55.639.736.223 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	55.639.736.223
Mutasi Tambah	55.639.736.223
Transfer Masuk	55.639.736.223
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	55.639.736.223
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-13.984.259.614
Nilai Buku per 30 Juni 2026	41.655.476.609

Mutasi Tambah berupa transfer masuk dari satker BPMP Provinsi Sumatera Selatan Bagian Anggaran 023 yang telah dilikuidasi karena dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih.

C.9. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 628.742.000 - dan Rp 884.452.000 . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan

Mutasi Tambah	884.452.000
Transfer Masuk	884.452.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	884.452.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	-322.606.903
Nilai Buku per 30 Juni 2026	561.845.097

Mutasi Tambah berupa transfer masuk dari satker BPMP Provinsi Sumatera Selatan Bagian Anggaran 023 yang telah dilikuidasi karena dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih.

C.10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 161.851.768 dan Rp 0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset tetap Lainnya

Mutasi Tambah	161.851.768
Transfer Masuk	161.851.768
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	0
Saldo per 30 Juni 2026	161.851.768
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	161.851.768

C.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - karena pada TA 2025 BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak tersedia anggaran untuk belanja modal renovasi Gedung dan bangunan.

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing -Rp 22.381.774.521 dan -Rp 22.003.999.664 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	8.074.908.004	1.144.134.507
Gedung dan Bangunan	55.895.446.223	13.984.259.614	41.911.186.609
Jalan, Irigasi dan Jaringan	628.742.000	322.606.903	306.135.097
Aset Tetap Lainnya	161.851.768	0	161.851.768
Jumlah	65.905.082.502	22.381.774.521	43.523.307.981

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp - dan Rp - . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

Rincian aset tak berwujud per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian Aset Tak Berwujud		Nilai
1.	Aplikasi Website Lembaga	0
		0
Jumlah		0

C.14. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp - dan Rp - . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-Lain	45.730.000	-45.730.000	0
Jumlah	45.730.000	-45.730.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.15. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 449.506.777 dan Rp 364.790.351 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Tabel 25. Rincian Utang Pihak Ketiga

Uraian/Penjelasan		Jumlah
1.	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2025 Rekening BSI	284.736.948
2.	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Juli Tahun 2025 Rekening BPD Sumsel Babel	68.570.934
3.	Pembayaran Gaji Induk PPPK Bulan Juli Tahun 2025 Rekening BSI	96.198.895
Jumlah		449.506.777

C.16. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 105.000.000 dan Rp 105.000.000.. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.17. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 300.000 dan Rp - Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Untuk nilai pendapatan diterima dimuka merupakan transaksi yang sudah dilakukan pencatatan pada bendahara namun belum terbit SP2D sampai dengan tutup buku periode 30 Juni 2026.

C.18. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp - dan Rp - , merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.19. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 86.617.084.884 dan Rp 89.114.123.078 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 40.628.000 dan Rp 24.065.000 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 26. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	40.628.000	24.065.000	68,83%
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Keuangan	0	0	-
Pendapatan Denda	0	0	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	12.987.000	-100,00%
Jumlah	40.628.000	37.052.000	9,65%

Pendapatan sampai dengan Keuangan Per 30 Juni 2026 diperoleh dari pendapatan dari pemanfaatan BMN, dimana pendapatan yang diperoleh berdasarkan dari hasil sewa asrama, ruang kelas maupun aula yang ada di BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 40.628.000.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 7.469.963.377 dan Rp 5.867.129.049 . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 27. Rincian Beban Pegawai

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.435.733.812	3.160.912.184	8,69%
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Tunj. Khusus & Transito	2.833.340.612	2.339.884.675	21,09%
Jumlah	6.269.074.424	5.500.796.859	13,97%

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 215.261.601 dan Rp 30.126.752 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Persediaan

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
B. Persediaan Bahan untuk Operasional	353.051.332	63.090.777	459,59%
B. Persediaan - dijual/diserahkan kpd Masyarakat	70.802.600	96.840.345	-26,89%
B. Persediaan utk Proses Produksi	0	0	-
B. Persediaan Bahan Lainnya	3.217.000	0	100,00%
Jumlah	427.070.932	159.931.122	167,03%

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.804.350.815 dan Rp 1.433.448.424 . Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Beban Barang Operasional	726.814.787	827.762.523	-12,20%
Beban Barang Non Operasional	1.255.232.060	254.192.600	393,81%
Beban Langganan Daya dan Jasa	226.763.418	286.765.521	-20,92%
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	-
Beban Jasa Konsultan	0	0	-
Beban Sewa	684.449.000	14.400.000	4653,12%
Beban Jasa Profesi	84.300.000	19.800.000	325,76%
Beban Jasa Lainnya	826.791.550	0	100,00%
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	-
Jumlah	3.804.350.815	1.402.920.644	171,17%

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 689.308.153 dan Rp 962.939.527 . Beban Pemeliharaan merupakan

beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan pada bulan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	463.427.000	804.820.000	-42,42%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158.894.022	125.155.502	26,96%
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	66.987.131	32.964.025	103,21%
Beban Persediaan suku cadang	0	0	-
Jumlah	689.308.153	962.939.527	-28,42%

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1.530.294.545 dan Rp 1.295.302.598 . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Beban Perjalanan Dinas Biasa	914.001.026	370.313.364	146,82%
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Beban Perjadin Paket Meeting Dalam Kota	616.293.519	61.675.870	899,25%
Beban Perjadin Paket Meeting Luar Kota	0	863.313.364	-100,00%
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0	-
Jumlah	1.530.294.545	1.295.302.598	18,14%

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 1.080.336.594 dan Rp 1.136.048.910 . Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
B. Penyusutan Peralatan dan Mesin	225.406.238	280.452.200	-19,63%
B. Penyusutan Gedung dan Bangunan	844.890.305	841.288.755	0,43%
B. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.040.051	14.307.955	-29,83%
B. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Penyusutan	1.080.336.594	1.136.048.910	-4,90%
B. Amortisasi Aset Lainnya	0	0	-
B. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Amortisasi	0	0	-
Jumlah B. Penyusutan dan Amortisasi	1.080.336.594	1.136.048.910	-4,90%

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp - dan Rp - .

D.11. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Rincian Kegiatan Non Operasional

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun
Pendapatan Selisih Kurs yg Blm Terealisasi	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	0	0	-
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	0	0	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	163.699.999	0	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	12.987.000	-100,00%
Penerimaan Kembali B. Kontribusi Sosial TAYL	0	0	-
Jumlah Pendapatan	163.699.999	12.987.000	1160,49%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
Kerugian Pelepasan Aset	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-
Jumlah	163.699.999	12.987.000	1160,49%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Ekuitas awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 88,255,619,266,- mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp 1,638,534,382,- sehingga jumlah ekuitas akhir per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 86,617,084,884,-.

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 88.255.619.266 dan Rp - .

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar -Rp 14.655.989.686 dan -Rp 10.784.783.605 . Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 13.017.455.304 dan Rp 99.898.906.683 . Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 34. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis Beban	Nilai Koreksi
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.221.783.303
Diterima dari Entitas Lain	-204.327.999
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	13.426.111.302

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar -Rp 204.327.999 sedangkan DKEL sebesar Rp 13.221.783.303 .

E.3.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga 30 Juni 2025, Transfer Masuk sebesar Rp - sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp - ..

E.3.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar -
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 adalah -

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 86.617.084.884 dan Rp89.114.123.078 .

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Temuan dan tindak lanjut BPK

Pada Tahun Anggaran 2026 Satuan Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak terdapat temuan BPK.

F.2. Rekening Pemerintah

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 (satu) buah rekening, yaitu Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kemendikbud dengan nomor 9898204195281000 atas nama BPG 014 LPMP PROV SUMSEL dan memiliki saldo per 30 Juni 2026 sebesar Rp. 104.812.686,-.

F.3. Struktur Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan nomor 0073/C7.13/KP.04.00/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan lainnya dan Staff PPK/Pengelola Keuangan/PPABP Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Adapun struktur pejabat perbendaharaan pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 BPMP, sebagai berikut:

Jabatan perbendaharaan	Nama pejabat perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran	Tajuddin Idris, S.Si., M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen	Yayuk Rahmawati, S.Si., M.Si.
Pejabat Penandatangan SPM	M. Ali Fainaludin, S.Ag., M.M.
Bendahara Pengeluaran	Samsuri, S.Kom.
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Edy Pramono, S.Sos.

Pada Tanggal 9 April 2026 terjadi perubahan kedudukan PPK Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan nomor 34 Tahun 2026 Tanggal 9 April 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan lainnya

dan Staff PPK/Pengelola Keuangan/PPABP Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Adapun struktur pejabat perbendaharaan pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 BPMP, sebagai berikut:

Jabatan perbendaharaan	Nama pejabat perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen	Tajuddin Idris, S.Si., M.T.
Pejabat Penandatangan SPM	M. Ali Fainaludin, S.Ag., M.M.
Bendahara Pengeluaran	Samsuri, S.Kom.
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	Edy Pramono, S.Sos.

F.4. Catatan Penting Lainnya

1. Pada 30 Juni 2026 tidak terdapat pagu minus;
2. Tidak terdapat retur yang belum terselesaikan per 30 Juni 2026;
3. Seluruh data transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersumber dari <https://sakti.kemenkeu.go.id/>. dan <https://myintress.kemenkeu.go.id/>.

Lampiran – lampiran

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca Percobaan kas
6. Neraca Percobaan Akrual
7. Laporan Realisasi Anggaran per akun
8. Laporan Realisasi Pendapatan per akun
9. Neraca Saldo Awal Tahun 2025
10. Surat Hasil Rekonsiliasi
11. Berita Acara Rekon Internal BMN
12. Berita Acara Stock Opname Persediaan
13. Laporan Barang Milik Negara
14. DIPA Awal
15. DIPA Revisi Terakhir
16. LPJ Bendahara Penerimaan
17. LPJ Bendahara Pengeluaran
18. Rekening Koran
19. SK Tarif BMN
20. SK Perbendaharaan, SK Pengelola Keuangan dan SK Operator SAKTI
21. Berita Acara Serah Terima Barang ke Masyarakat
22. Dokumen Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang masih harus dibayar
23. Dokumen Utang yang belum diterima tagihannya
24. Memo Penyesuaian
25. Telaah Laporan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran – lampiran

1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca Percobaan kas
5. Neraca Percobaan Akrual
6. Laporan Realisasi Anggaran
7. Laporan Realisasi Anggaran per akun
8. Laporan Realisasi Pendapatan per akun
9. Neraca Saldo Awal Tahun 2025
10. Surat Hasil Rekonsiliasi
11. Berita Acara Rekon Internal BMN
12. Berita Acara Stock Opname Persediaan
13. Laporan Barang Milik Negara
14. DIPA Awal
15. DIPA Revisi Terakhir
16. LPJ Bendahara Penerimaan
17. LPJ Bendahara Pengeluaran
18. Rekening Koran
19. SK Tarif BMN
20. SK Perbendaharaan, SK Pengelola Keuangan dan SK Operator SAKTI
21. Dokumen Lelang BMN
22. Dokumen Hibah BMN
23. Capaian Rincian Output Per Fungsi pada Catatan Atas Laporan Keuangan
24. Capaian Program Prioritas Nasional
25. Telaah Laporan
26. Surat Pengantar Laporan

NERACA

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
 WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:41 a

Tgl Cetak : 20/07/26 15:41 a

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	105.000.000,	0	105.000.000	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1.410.876,	1.410.876	0	0,00
Persediaan	67.162.804,	175.553.815	(108.391.011)	(61,74)
JUMLAH ASET LANCAR	173.573.680,	176.964.691	(3.391.011)	(1,92)
ASET TETAP				
Tanah	43.475.010.000,	43.475.010.000	0	0,00
Peralatan dan Mesin	9.219.042.511,	10.262.699.982	(1.043.657.471)	(10,17)
Gedung dan Bangunan	55.895.446.223,	55.895.446.223	0	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	628.742.000,	628.742.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	161.851.768,	161.851.768	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(22.381.774.521,)	(22.345.095.398)	(36.679.123)	0,16
JUMLAH ASET TETAP	86.998.317.981,	88.078.654.575	(1.080.336.594)	(1,23)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	342.000.000,	0	342.000.000	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(342.000.000,)	0	(342.000.000)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,	0	0	NaN
JUMLAH ASET	87.171.891.661,	88.255.619.266	(1.083.727.605)	(1,23)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	449.506.777,	0	449.506.777	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	300.000,	0	300.000	0,00
Uang Muka dari KPPN	105.000.000,	0	105.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	554.806.777,	0	554.806.777	Infinity
JUMLAH KEWAJIBAN	554.806.777,	0	554.806.777	Infinity
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	86.617.084.884,	88.255.619.266	(1.638.534.382)	(1,86)
JUMLAH EKUITAS	86.617.084.884,	88.255.619.266	(1.638.534.382)	(1,86)
JUMLAH EKUITAS	86.617.084.884,	88.255.619.266	(1.638.534.382)	(1,86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	87.171.891.661	88.255.619.266	(1.083.727.605)	(1,23)

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENJAMINAN
 MUTU PENDIDIKAN
 PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

TAJUDDIN IDRIS

197203302002121002

LAPORAN OPERASIONAL

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

ESELON I

: (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI

: (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA

: (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:41 a

lgi : 20/07/26 15:25 a

Cetak : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Pajak Penghasilan	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangun	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Cukai	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Pajak Lainnya	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Bea Masuk	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Bea Keluar	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0,
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0,
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	40.628.000,	24.065.000,	16.563.000,	68,826
Pendapatan Badan Laya Umum	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	40.628.000,	24.065.000,	16.563.000,	68,826
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan	40.628.000,	24.065.000,	16.563.000,	68,826
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
Beban Pegawai	7.469.963.377,	5.867.129.049,	1.602.834.328,	27,319
Beban Persediaan	215.261.601,	30.126.752,	185.134.849,	614,52
Beban Barang dan Jasa	3.804.350.815,	1.433.448.424,	2.370.902.391,	165,399
Beban Pemeliharaan	689.308.153,	962.939.527,	(273.631.374,)	(28,416)
Beban Perjalanan Dinas	1.530.294.545,	1.295.302.598,	234.991.947,	18,142
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	70.802.600,	96.840.345,	(26.037.745,)	(26,887)

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

ESELON I

: (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI

: (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA

: (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:41 a

Igl : 20/07/26 15:25 a

Cetak : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0,
Beban Subsidi	0,	0,	0,	0,
Beban Hibah	0,	0,	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.080.336.594,	1.136.048.910,	(55.712.316,)	(4,904)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,	0,	0,	0,
Beban Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0,
Beban Lain-Lain	0,	0,	0,	0,
JUMLAH BEBAN	14.860.317.685,	10.821.835.605,	4.038.482.080,	37,318
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(14.819.689.685,)	(10.797.770.605,)	(4.021.919.080,)	37,248
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	163.699.999,	0,	163.699.999,	Infinity
Pendapatan Pelepasan Aset	163.699.999,	0,	163.699.999,	Infinity
Beban Pelepasan Aset	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,	0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	12.987.000,	(12.987.000,)	(100,)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	12.987.000,	(12.987.000,)	(100,)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,	0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	163.699.999,	12.987.000,	150.712.999,	1.160,491
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14.655.989.686,)	(10.784.783.605,)	(3.871.206.081,)	35,895
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	0,
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	0,
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO	(14.655.989.686,)	(10.784.783.605,)	(3.871.206.081,)	35,895

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 20 Juli 2026

KUASA PENGUNA ANGGARAN



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 3:28 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	88,255,619,266	0	88,255,619,266	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14,655,989,686)	(10,784,783,605)	(3,871,206,081)	35.9
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,017,455,304	99,898,906,683	(86,881,451,379)	(86.97)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,638,534,382)	89,114,123,078	(90,752,657,460)	(101.84)
EKUITAS AKHIR	86,617,084,884	89,114,123,078	(2,497,038,194)	(2.8)

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UARPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAJUDDIN IDRIS

197203302002121002

NERACA PERCOBAAN BASIS KAS

**PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026**

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 3:41 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	13,221,783,303
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	204,327,999	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	163,699,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	40,628,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,336,101,120	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26,616	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	173,059,700	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	57,319,514	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	13,860,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	206,380,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	298,908,682	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	117,972,180	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	165,126,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	66,980,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	570,015,716	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,568	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	34,526,725	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,669,015	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35,244,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	79,669,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	32,941,246	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,244,358,485	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	588,982,127	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	689,348,977	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	225,810	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	37,240,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,240,782,060	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	14,450,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	244,660,321	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	209,874,294	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,922,740	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	12,966,384	0
3.0	522141	Belanja Sewa	684,449,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	84,300,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	826,791,550	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	463,427,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158,894,022	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	913,701,026	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 3:41 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	616,293,519	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	6,291,494
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,405,000
JUMLAH			13,435,807,796	13,435,807,796

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



TAJUDDIN IDRIS

197203302002121002

NERACA PERCOBAAN BASIS AKRUAL

**PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026**

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:41 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 3:41 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	105,000,000	0
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1,410,876	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	35,806,554	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,992,750	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	25,363,500	0
0.0	131111	Tanah	43,475,010,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	9,219,042,511	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	55,895,446,223	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	141,886,000	0
0.0	134112	Irigasi	486,856,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	161,851,768	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,074,908,004
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,984,259,614
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	141,886,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	180,720,903
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	342,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	342,000,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	449,506,777
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	300,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	105,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,221,783,303
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	204,327,999	0
0.0	391111	Ekuitas	0	88,255,619,266
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	163,699,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	40,628,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,615,601,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29,700	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	193,410,150	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	64,250,862	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	15,660,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	228,125,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	293,632,288	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	131,949,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	165,126,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	71,560,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	647,903,416	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,487	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	40,202,355	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 20/07/26 12:41 PM

Tgl Cetak : 20/07/26 3:41 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	10,094,061	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	41,038,000	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	79,669,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	38,356,246	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,244,358,485	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	588,982,127	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	689,348,977	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	225,810	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37,240,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,240,782,060	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	14,450,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	209,874,294	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,922,740	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,966,384	0
3.0	522141	Beban Sewa	684,449,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	84,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	826,791,550	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	463,427,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	158,894,022	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	914,001,026	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	616,293,519	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	225,406,238	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	844,890,305	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	10,040,051	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	212,044,601	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	66,987,131	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	70,802,600	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	3,217,000	0
JUMLAH			124,960,311,866	124,960,311,866

Keterangan :

FINAL

Indralaya, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAJUDDIN IDRIS

197203302002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 138
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 04
SATUAN KERJA : BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN 693243

Tgl Data : 20/07/26 12:41 PM
Tgl Cetak : 20/07/26 3:40 PM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	81,000,000	204,327,999	123,327,999	252	79,000,000	37,052,000	41,948,000	47
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	81,000,000	204,327,999	123,327,999	252	79,000,000	37,052,000	41,948,000	47
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	81,000,000	204,327,999	123,327,999	252	79,000,000	37,052,000	41,948,000	47
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	25,613,852,000	13,221,783,303	(12,392,068,697)	52	31,076,529,000	9,222,557,780	21,853,971,220	30
1. Belanja Pegawai	14,939,789,000	7,020,456,600	(7,919,332,400)	47	10,916,889,000	5,500,796,859	5,416,092,141	50
2. Belanja Barang	10,674,063,000	6,201,326,703	(4,472,736,297)	58	20,159,640,000	3,721,760,921	16,437,879,079	18
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 138
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH 04
SATUAN KERJA : BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN 693243

Tgl Data : 20/07/26 12:41 PM
Tgl Cetak : 20/07/26 3:40 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	25,613,852,000	13,221,783,303	(12,392,068,697)	52	31,076,529,000	9,222,557,780	21,853,971,220	30
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL
Indralaya, 20 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAJUDDIN IDRIS
197203302002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 138
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 693243
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 20/07/26 3:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4		9=4-7
522151	Belanja Jasa Profesi	33,300,000	8,100,000	0	0	0	0		8,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,842,457,000	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,857,564,000	665,971,000	226,763,418	0	226,763,418	34.05		439,207,582
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	981,722,000	736,291,000	463,427,000	0	463,427,000	62.94		272,864,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	476,281,000	288,909,000	158,894,022	0	158,894,022	55		130,014,978
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,458,003,000	1,025,200,000	622,321,022	0	622,321,022	60.7		402,878,978
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	918,438,000	454,005,000	382,937,146	0	382,937,146	84.35		71,067,854
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137,392,000	85,685,000	0	0	0	0		85,685,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,550,000	0	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,079,380,000	539,690,000	382,937,146	0	382,937,146	70.96		156,752,854
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,311,654,000	4,198,772,000	2,255,022,754	0	2,255,022,754	53.71		1,943,749,246
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7606.EBA	21,251,443,000	19,138,561,000	9,285,175,848	9,696,494	9,275,479,354	48.516		9,863,081,646
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN7606	21,251,443,000	19,138,561,000	9,285,175,848	9,696,494	9,275,479,354	48.52		9,863,081,646
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	34,594,822,000	25,613,852,000	13,231,479,797	9,696,494	13,221,783,303	51.66		12,392,068,697
	JUMLAH BELANJA	34,594,822,000	25,613,852,000	13,231,479,797	9,696,494	13,221,783,303	51.66		12,392,068,697

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SATUAN KERJA

: 138
: 693243

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 20/07/26 3:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_por

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	13,343,379,000	6,475,291,000	3,946,303,949	0	3,946,303,949	60.94	2,528,987,051
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DI	13,343,379,000	6,475,291,000	3,946,303,949	0	3,946,303,949	60.94	2,528,987,051
WA	Program Dukungan Manajemen							
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	21,251,443,000	19,138,561,000	9,285,175,848	9,696,494	9,275,479,354	48.52	9,863,081,646
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	21,251,443,000	19,138,561,000	9,285,175,848	9,696,494	9,275,479,354	48.52	9,863,081,646
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	34,594,822,000	25,613,852,000	13,231,479,797	9,696,494	13,221,783,303	51.66	12,392,068,697
	JUMLAH	34,594,822,000	25,613,852,000	13,231,479,797	9,696,494	13,221,783,303	51.66	12,392,068,697

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BELANJA
PER AKUN**

**PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 138
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 693243
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/07/26 3:42 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 20/7/26 12:56 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,230,567,000	4,719,166,000	2,336,101,120	0	2,336,101,120	49.5	2,383,064,880
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	80,000	80,000	26,616	0	26,616	33.27	53,384
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	376,321,000	376,321,000	173,059,700	0	173,059,700	45.99	203,261,300
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111,012,000	111,012,000	57,319,514	0	57,319,514	51.63	53,692,486
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,314,000	25,314,000	13,860,000	0	13,860,000	54.75	11,454,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	251,115,000	251,115,000	206,380,000	0	206,380,000	82.19	44,735,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	18,599,000	300,000,000	298,908,682	6,291,494	292,617,188	97.54	7,382,812
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	272,804,000	272,804,000	117,972,180	0	117,972,180	43.24	154,831,820
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	570,834,000	570,834,000	165,126,000	0	165,126,000	28.93	405,708,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	171,113,000	171,113,000	66,980,000	3,405,000	63,575,000	37.15	107,538,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,027,759,000	6,797,759,000	3,435,733,812	9,696,494	3,426,037,318	50.4	3,371,721,682
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,837,500,000	1,617,690,000	570,015,716	0	570,015,716	35.24	1,047,674,284
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	100,000	12,568	0	12,568	12.57	87,432
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	68,107,000	34,526,725	0	34,526,725	50.69	33,580,275
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	17,100,000	8,669,015	0	8,669,015	50.7	8,430,985
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	69,523,000	35,244,400	0	35,244,400	50.69	34,278,600
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	230,000,000	79,669,000	0	79,669,000	34.64	150,331,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	64,980,000	32,941,246	0	32,941,246	50.69	32,038,754
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2,067,500,000	761,078,670	0	761,078,670	36.81	1,306,421,330
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	4,604,530,000	4,604,530,000	2,244,358,485	0	2,244,358,485	48.74	2,360,171,515
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,470,000,000	1,470,000,000	588,982,127	0	588,982,127	40.07	881,017,873
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,074,530,000	6,074,530,000	2,833,340,612	0	2,833,340,612	46.64	3,241,189,388
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14,939,789,000	14,939,789,000	7,030,153,094	9,696,494	7,020,456,600	46.99	7,919,332,400
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	192,000,000	1,461,967,000	689,348,977	0	689,348,977	47.15	772,618,023
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18,000,000	3,600,000	225,810	0	225,810	6.27	3,374,190
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	117,240,000	64,482,000	37,240,000	0	37,240,000	57.75	27,242,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	327,240,000	1,530,049,000	726,814,787	0	726,814,787	47.5	803,234,213
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional							



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 138
: 04
: 1100
: 693243
: KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/07/26 3:42 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 20/7/26 12:56 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	839,367,000	1,678,621,000	1,240,782,060	0	1,240,782,060	73.92	437,838,940
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	137,750,000	81,000,000	14,450,000	0	14,450,000	17.84	66,550,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	992,117,000	1,764,621,000	1,255,232,060	0	1,255,232,060	71.13	509,388,940
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	445,571,000	251,202,000	244,660,321	0	244,660,321	97.4	6,541,679
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	445,571,000	251,202,000	244,660,321	0	244,660,321	97.4	6,541,679
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	840,000,000	577,071,000	209,874,294	0	209,874,294	36.37	367,196,706
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	10,800,000	3,922,740	0	3,922,740	36.32	6,877,260
522113	Belanja Langganan Air	117,807,000	60,000,000	12,966,384	0	12,966,384	21.61	47,033,616
522141	Belanja Sewa	0	684,450,000	684,449,000	0	684,449,000	100	1,000
522151	Belanja Jasa Profesi	315,900,000	207,150,000	84,300,000	0	84,300,000	40.7	122,850,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,842,457,000	839,719,000	826,791,550	0	826,791,550	98.46	12,927,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	3,140,164,000	2,379,190,000	1,822,303,968	0	1,822,303,968	76.59	556,886,032
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	981,722,000	736,291,000	463,427,000	0	463,427,000	62.94	272,864,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	476,281,000	288,909,000	158,894,022	0	158,894,022	55	130,014,978
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,458,003,000	1,025,200,000	622,321,022	0	622,321,022	60.7	402,878,978
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,835,790,000	1,642,480,000	913,701,026	0	913,701,026	55.63	728,778,974
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	137,392,000	1,788,207,000	616,293,519	0	616,293,519	34.46	1,171,913,481
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,318,756,000	293,114,000	0	0	0	0	293,114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	13,291,938,000	3,723,801,000	1,529,994,545	0	1,529,994,545	41.09	2,193,806,455
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	19,655,033,000	10,674,063,000	6,201,326,703	0	6,201,326,703	58.1	4,472,736,297
	JUMLAH BELANJA	34,594,822,000	25,613,852,000	13,231,479,797	9,696,494	13,221,783,303	51.62	12,392,068,697

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 138
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 693243
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 20/07/26 3:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Fasilitas dan Pembinaan Lembaga							
QDB	BELANJA BARANG							
52	Belanja Barang Non Operasional							
5212	Belanja Bahan	717,721,000	1,502,761,000	1,189,256,000	0	1,189,256,000	79.14	313,505,000
521211	Belanja Honor Output Kegiatan	130,500,000	75,200,000	14,450,000	0	14,450,000	19.22	60,750,000
521213	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	848,221,000	1,577,961,000	1,203,706,000	0	1,203,706,000	76.28	374,255,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	684,450,000	684,449,000	0	684,449,000	100	1,000
522151	Belanja Jasa Profesi	282,600,000	199,050,000	84,300,000	0	84,300,000	42.35	114,750,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	829,719,000	826,791,550	0	826,791,550	99.65	2,927,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	282,600,000	1,713,219,000	1,595,540,550	0	1,595,540,550	93.13	117,678,450
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,917,352,000	1,188,475,000	530,763,880	0	530,763,880	44.66	657,711,120
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	1,702,522,000	616,293,519	0	616,293,519	36.2	1,086,228,481
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,295,206,000	293,114,000	0	0	0	0	293,114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,212,558,000	3,184,111,000	1,147,057,399	0	1,147,057,399	36.02	2,037,053,601
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,343,379,000	6,475,291,000	3,946,303,949	0	3,946,303,949	60.94	2,528,987,051
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 7605.QDB	13,343,379,000	6,475,291,000	3,946,303,949	0	3,946,303,949	60.944	2,528,987,051
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN7605	13,343,379,000	6,475,291,000	3,946,303,949	0	3,946,303,949	60.94	2,528,987,051
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,230,567,000	4,719,166,000	2,336,101,120	0	2,336,101,120	49.5	2,383,064,880
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80,000	80,000	26,616	0	26,616	33.27	53,384
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	376,321,000	376,321,000	173,059,700	0	173,059,700	45.99	203,261,300
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	111,012,000	111,012,000	57,319,514	0	57,319,514	51.63	53,692,486
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,314,000	25,314,000	13,860,000	0	13,860,000	54.75	11,454,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	251,115,000	251,115,000	206,380,000	0	206,380,000	82.19	44,735,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	18,599,000	300,000,000	298,908,682	6,291,494	292,617,188	97.54	7,382,812
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	272,804,000	272,804,000	117,972,180	0	117,972,180	43.24	154,831,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	570,834,000	570,834,000	165,126,000	0	165,126,000	28.93	405,708,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 138
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 693243
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 20/07/26 3:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	171,113,000	171,113,000	66,980,000	3,405,000	63,575,000	37.15	107,538,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,027,759,000	6,797,759,000	3,435,733,812	9,696,494	3,426,037,318	50.54	3,371,721,682
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,837,500,000	1,617,690,000	570,015,716	0	570,015,716	35.24	1,047,674,284
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	100,000	12,568	0	12,568	12.57	87,432
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	68,107,000	34,526,725	0	34,526,725	50.69	33,580,275
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	17,100,000	8,669,015	0	8,669,015	50.7	8,430,985
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	69,523,000	35,244,400	0	35,244,400	50.69	34,278,600
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	230,000,000	79,669,000	0	79,669,000	34.64	150,331,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	64,980,000	32,941,246	0	32,941,246	50.69	32,038,754
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2,067,500,000	761,078,670	0	761,078,670	36.81	1,306,421,330
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,837,500,000	2,067,500,000	761,078,670	0	761,078,670	36.81	1,306,421,330
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	4,604,530,000	4,604,530,000	2,244,358,485	0	2,244,358,485	48.74	2,360,171,515
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,470,000,000	1,470,000,000	588,982,127	0	588,982,127	40.07	881,017,873
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6,074,530,000	6,074,530,000	2,833,340,612	0	2,833,340,612	46.64	3,241,189,388
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,939,789,000	14,939,789,000	7,030,153,094	9,696,494	7,020,456,600	47.06	7,919,332,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14,939,789,000	14,939,789,000	7,030,153,094	9,696,494	7,020,456,600	47.06	7,919,332,400
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	192,000,000	1,461,967,000	689,348,977	0	689,348,977	47.15	772,618,023
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18,000,000	3,600,000	225,810	0	225,810	6.27	3,374,190
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	117,240,000	64,482,000	37,240,000	0	37,240,000	57.75	27,242,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	327,240,000	1,530,049,000	726,814,787	0	726,814,787	47.5	803,234,213
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	327,240,000	1,530,049,000	726,814,787	0	726,814,787	47.5	803,234,213
5212	Belanja Barang Non Operasional	121,646,000	175,860,000	51,526,060	0	51,526,060	29.3	124,333,940
521211	Belanja Bahan	7,250,000	5,800,000	0	0	0	0	5,800,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	15,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	143,896,000	186,660,000	51,526,060	0	51,526,060	27.6	135,133,940
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	143,896,000	186,660,000	51,526,060	0	51,526,060	27.6	135,133,940
5218	Belanja Barang Persediaan	445,571,000	251,202,000	244,660,321	0	244,660,321	97.4	6,541,679
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	445,571,000	251,202,000	244,660,321	0	244,660,321	97.4	6,541,679
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	445,571,000	251,202,000	244,660,321	0	244,660,321	97.4	6,541,679
5221	Belanja Jasa	840,000,000	577,071,000	209,874,294	0	209,874,294	36.37	367,196,706
522111	Belanja Langganan Listrik	24,000,000	10,800,000	3,922,740	0	3,922,740	36.32	6,877,260
522112	Belanja Langganan Telepon	117,807,000	60,000,000	12,966,384	0	12,966,384	21.61	47,033,616
522113	Belanja Langganan Air							

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN**

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 138
: 04
: 1100
: 693243

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 20/07/26 3:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	0	163,699,999	0	163,699,999	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	81,000,000	40,628,000	0	40,628,000	50.16
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		204,327,999	0	204,327,999	252.26
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	81,000,000				
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	81,000,000	204,327,999	0	204,327,999	252.26
	JUMLAH PENDAPATAN	81,000,000	204,327,999	0	204,327,999	252.26

**NERACA SALDO AWAL
TAHUN 2026**

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 138
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 693243

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tgl. Cetak 20/07/2026 3:46 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1,410,876	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	63,651,848	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12,518,867	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	96,166,100	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	3,217,000	0
0.0	131111	Tanah	43,475,010,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,262,699,982	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	55,895,446,223	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	141,886,000	0
0.0	134112	Irigasi	486,856,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	161,851,768	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	8,893,159,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,139,369,309
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	141,886,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	170,680,852
0.0	391111	Ekuitas	0	88,255,619,266
JUMLAH			110,600,714,664	110,600,714,664

SURAT HASIL REKONSILIASI
SAKTI-SPAN

PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-01

Tgl Cetak : 09/03/26 10:30
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,721,426,000	25,721,426,000	0
2	Belanja	914,614,343	914,614,343	0
3	Pengembalian Belanja	-3,405,000	-3,405,000	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	105,000,000	105,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	105,000,000	105,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11 Februari 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-02

Tgl Cetak : 01/04/26 8:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,721,426,000	25,721,426,000	0
2	Belanja	3,752,134,005	3,752,134,005	0
3	Pengembalian Belanja	-3,405,000	-3,405,000	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,176,000	9,176,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	305,000,000	305,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	305,000,000	305,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 30 Maret 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-03

Tgl Cetak : 14/04/26 10:46
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,721,426,000	25,721,426,000	0
2	Belanja	6,500,449,628	6,500,449,628	0
3	Pengembalian Belanja	-9,696,494	-9,696,494	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,176,000	9,176,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	375,439,000	375,439,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	375,439,000	375,439,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 April 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-04

Tgl Cetak : 12/05/26 9:02
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,613,852,000	25,613,852,000	0
2	Belanja	8,180,215,616	8,180,215,616	0
3	Pengembalian Belanja	-9,696,494	-9,696,494	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	25,921,000	25,921,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	244,299,665	244,299,665	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	244,299,665	244,299,665	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11 Mei 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-05

Tgl Cetak : 15/06/26 9:18
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,613,852,000	25,613,852,000	0
2	Belanja	9,593,691,379	9,593,691,379	0
3	Pengembalian Belanja	-9,696,494	-9,696,494	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	169,079,000	169,079,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	359,939,814	359,939,814	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	359,939,814	359,939,814	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Juni 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 693243 - BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 20/07/26 2:38
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	25,613,852,000	25,613,852,000	0
2	Belanja	13,231,479,797	13,231,479,797	0
3	Pengembalian Belanja	-9,696,494	-9,696,494	0
4	Estimasi Pendapatan	81,000,000	81,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	204,327,999	204,327,999	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	105,000,000	105,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	105,000,000	105,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026



**BERITA ACARA
REKON INTERNAL BMN**

**PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026**



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN GLP

Nomor : 1200/B/C6.13/LK.05.02/2026

Pada hari ini, rabu, tanggal lima belas, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara Modul Persediaan, Modul Aset tetap, dan Modul General Ledger dan Pelaporan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk pelaporan periode 30 Juni 2026 di Satuan Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kode Satuan Kerja 693243.

Hasil Integrasi/penggabungan Persediaan, Aset Tetap, dan GLP dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

No	Nama Perkiraan	Saldo menurut ASET	Saldo menurut GLP	Selisih
1	2	3	4	5
I	POSISI BMN DI NERACA	87.065.480.785	87.065.480.785	-
A	ASET LANCAR	67.162.804	67.162.804	-
1	Persediaan	67.162.804	67.162.804	-
B	ASET TETAP	86.998.317.981	86.998.317.981	-
1	Tanah	43.475.010.000	43.475.010.000	-
2	Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	9.219.042.511	-
3	Akumulasi Penyusutan	- 8.074.908.004	- 8.074.908.004	-
4	Gedung dan Bangunan	55.895.446.223	55.895.446.223	-
5	Akumulasi Penyusutan	- 13.984.259.614	- 13.984.259.614	-
6	Jalan dan Jembatan	141.886.000	141.886.000	-
7	Akumulasi Penyusutan	- 141.886.000	- 141.886.000	-
8	Irigasi	486.856.000	486.856.000	-
9	Akumulasi Penyusutan Irigasi	- 180.720.903	- 180.720.903	-
10	Aset Tetap Lainnya	161.851.768	161.851.768	-
11	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	342.000.000	342.000.000	-
12	Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	- 342.000.000	- 342.000.000	-
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud	-	-	-
4	Aset Lain-lain	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMTABEL			
1	BMN Ekstrakomtabel	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
B	BPYBS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
	TOTAL (I+II)	87.065.480.785	87.065.480.785	-

Penjelasan :

1. Tidak ada selisih antara saldo aset dengan saldo GLP

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya di tuangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan lampiran Laporan hasil rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini, (lampiran berupa Neraca Persediaan, Aset Tetap, dan GLP).

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Persediaan



Tedi Rahman, S.T.

Operator Aset Tetap



Amrina Rosyada Putri, A.Md.Ak.

Operator GLP



Samak, A.Md., S.Pd.



Mengetahui
Kepala,

Valuddin Idris, S.Si., M.T.

**BERITA ACARA STOCK OPNAME
FISIK PERSEDIAAN**

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026



BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nomor :1199/B/C6.13/LK.05.03/2026

Pada hari ini, rabu, tanggal lima belas, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tedi Rahman, S.T.
NIP : 197310312003121001
Jabatan : Operator Persediaan

telah melakukan stock opname fisik atas barang persediaan untuk periode pelaporan 30 Juni 2026 di BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai total persediaan sebesar Rp 67.162.804,- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Nilai
117111	Barang Konsumsi	35.806.554
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5.992.750
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	25.363.500
117199	Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	67.162.804

Kode	Uraian	Qty	Nilai Per 30-6-2026
117111	Barang Konsumsi		
000001	TINTA CAP PRESS	10	143.000
000001	NECIS NO.10 KECIL	12	1.545.120
000002	ISI NECIS NO. 10	29	2.233.920
000006	BINDER NO. 260	19	1.708.290
000002	TIP-EX	25	285.240
000003	STABILO	10	30.518
000003	BUKU FOLIO ISI 100 LBR	1	25.000
000009	Buku Folio 100 Lbr	5	216.450
000003	MAP KERTAS POLIO	1	72.150
000004	MAP ORDNER	9	595.800
000012	MAP KANCING SCHOOL BAG	36	709.200
000002	MISTAR BESI 30 CM	6	264.000
000006	REFILL MATA PISAU CUTTER	15	216.000
000014	SOLATIP KERTAS	36	492.156
000042	Pena Snowman	5	235.000
000003	LAK BAN COKLAT	1	15.540
000007	LAKBAN HITAM 2 INCH	3	66.300

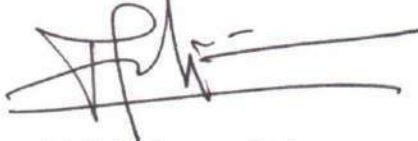
000008	LAKBAN BENING BESAR	5	91.000
000001	SPIDOL WHITE BOARD	2	249.600
000005	KERTAS HVS F4 70 GRAM	20	1.352.000
000006	KERTAS HVS A4 70 GRAM	20	1.222.000
000002	KERTAS KAMBING	4	182.000
000003	KERTAS PHOTO	3	97.500
000005	KERTAS KULIT KAMBING	7	308.000
000006	POST IT	50	862.450
000013	KERTAS PEMBATAS	15	232.500
000011	PLASTIK TRANSPARAN	2	156.000
000004	TONER LASER JET 85 A	1	349.650
000008	TONER LASERJET 78 A	1	2.372.500
000023	TINTA CANON GI-790 (BK)	3	472.860
000029	TONER LASERJET 17 A	1	1.443.000
000035	REFIL EPSON 3110 003 BK	2	260.000
000036	REFIL EPSON 3110 003 Y	6	674.000
000037	REFIL EPSON 3110 003 C	4	467.000
000038	REFIL EPSON 3110 003 M	6	674.000
000043	Refill Epson 003 (BK)	4	414.000
000047	Toner 83 A Original	1	1.573.860
000049	Toner 17 A Ori	4	5.044.900
000006	Lampu Emergensi 15 W	15	2.070.000
000007	Lampu Listrik 5 W	50	1.975.050
000015	Bola Lampu XL 12 W	50	4.095.000
000008	Batu Baterai AAA	20	182.000
000008	Box MCB R16	3	132.000
	Jumlah per Akun		35.806.554
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		
000001	SAPU LOTENG	5	227.500
000002	SAPU LANTAI PASTIK	5	327.500
000003	ALAT PEL LANTAI	5	337.500
000005	SAPU LIDI BERGAGANG	5	112.500
000006	SIKAT WC BERGAGANG	5	162.500
000007	SIKAT LANTAI BERGAGANG	5	247.500
000008	KEMOCENG BULU AYAM	5	182.500
000005	TISSUE GULUNG	8	60.480
000012	SPON CUCI PIRING	4	40.320
000001	EMBER PLASTIK	2	151.000
000001	KESET KAKI	4	160.000
000003	SEROKAN SAMPAH	8	284.000
000013	KANTONG SAMPAH	5	61.050
000014	KARET PEL KACA	2	64.000
000001	PORSTEK	4	151.200
000006	SABUN CUCI PIRING SUNLAIGH	30	1.701.000
000001	KEMOCENG	5	142.500
000002	PISAU MESIN RUMPUT	8	704.000
000004	BUSI MESIN RUMPUT	12	124.200
000071	BAYGON	10	585.000

000072	Racun Rumput	1	166.500
	Jumlah per Akun		5.992.750
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		
000096	Tempat Ruang Kelas Darurat	1	25.363.500
	Jumlah per Akun		25.363.500
	Total Persediaan 30 Juni 2026		67.162.804

Setelah dilakukan pencocokan tidak ditemukan selisih antara kartu stock barang persediaan dengan kondisi fisik opname barang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Persediaan,



Tedi Rahman, S.T.



Tajuddin Idris, S.Si, M.T.

LAPORAN BMN

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Sumatera Selatan

LAPORAN BMN SEMESTER I TAHUN 2026

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH



Nomor : 1198/B/C6.13/LK.05.01/2026
Lampiran : Satu lembar
Hal : Penyampaian Laporan BMN Semester I TA 2026

15 Juli 2026

Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNFI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun Anggaran 2026 pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tauddin Idris, S.Si, M.T.



BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL PERSEDIAAN, ASET TETAP, DAN GLP

Nomor : 1200/B/C6.13/LK.05.02/2026

Pada hari ini, rabu, tanggal lima belas, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara Modul Persediaan, Modul Aset tetap, dan Modul General Ledger dan Pelaporan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk pelaporan periode 30 Juni 2026 di Satuan Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Kode Satuan Kerja 693243.

Hasil Integrasi/penggabungan Persediaan, Aset Tetap, dan GLP dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

No	Nama Perkiraan	Saldo menurut ASET	Saldo menurut GLP	Selisih
1	2	3	4	5
I	POSISI BMN DI NERACA	87.065.480.785	87.065.480.785	-
A	ASET LANCAR	67.162.804	67.162.804	-
1	Persediaan	67.162.804	67.162.804	-
B	ASET TETAP	86.998.317.981	86.998.317.981	-
1	Tanah	43.475.010.000	43.475.010.000	-
2	Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	9.219.042.511	-
3	Akumulasi Penyusutan	- 8.074.908.004	- 8.074.908.004	-
4	Gedung dan Bangunan	55.895.446.223	55.895.446.223	-
5	Akumulasi Penyusutan	- 13.984.259.614	- 13.984.259.614	-
6	Jalan dan Jembatan	141.886.000	141.886.000	-
7	Akumulasi Penyusutan	- 141.886.000	- 141.886.000	-
8	Irigasi	486.856.000	486.856.000	-
9	Akumulasi Penyusutan Irigasi	- 180.720.903	- 180.720.903	-
10	Aset Tetap Lainnya	161.851.768	161.851.768	-
11	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	342.000.000	342.000.000	-
12	Akumulasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	- 342.000.000	- 342.000.000	-
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
3	Aset Tak Berwujud	-	-	-
4	Aset Lain-lain	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMTABEL			
1	BMN Ekstrakomtabel	-	-	-
2	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
B	BPYBS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
	TOTAL (I+II)	87.065.480.785	87.065.480.785	-

Penjelasan :

1. Tidak ada selisih antara saldo aset dengan saldo GLP

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya di tuangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan lampiran Laporan hasil rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini, (lampiran berupa Neraca Persediaan, Aset Tetap, dan GLP).

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Persediaan



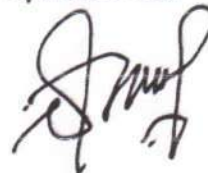
Tedi Rahman, S.T.

Operator Aset Tetap



Amrina Rosyada Putri, A.Md.Ak.

Operator GLP



Samak, A.Md., S.Pd.



Mengetahui
Kepala,

Valuddin Idris, S.Si., M.T.



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/ PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensektipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Bamng kepada Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Entitas Pelaporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna ini dibuat untuk menyampaikan laporan BMN yang telah digunakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang bertempat di Indralaya Kab. Ogan Ilir.

C. Periode Pelaporan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan membuat Laporan Barang Kuasa Pengguna untuk periode laporan tahun 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 ini adalah sebesar Rp 109.722.092.502,- (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal sebesar Rp 110.423.749.973,- (Seratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan nilai mutasi bertambah sebesar Rp 1.265.725.936,- (Satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dan mutasi berkurang sebesar Rp 1.967.383.407,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi

non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang Tahunan;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2026

Nilai BMN per 1 Januari 2026 menurut BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp 110.423.749.973.- (Seratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 110.423.749.973.- (Seratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Saldo Tahun 2026 Semestrer I ini adalah sebesar Rp 109.722.092.502,- (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Ribu Rupiah), dengan nilai mutasi bertambah sebesar Rp 1.265.725.936,- (Satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima

ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dan mutasi berkurang sebesar Rp 1.967.383.407,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Anggaran Tahun 2026

Mutasi BMN Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 67.162.804,- (Enam puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 175.553.815,- (Seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan total **mutasi tambah** Rp 0 -, Rupiah (Nol rupiah) dan **mutasi kurang** Rp 108.391.011,- (Seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sebelas rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Akun	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	63.651.848	27.845.294	35.806.554
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12.518.867	6.526.117	5.992.750
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual	96.166.100	70.802.600	25.363.500
117199	Persediaan Lainnya	3.217.000	3.217.000	-
	Jumlah	175.553.815	108.391.011	67.162.804

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp 0,- yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp 0,- dan kondisi usang senilai Rp 0,-

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 43.475.010.000,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) dengan luas tanah 25.776 m2. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 43.475.010.000,- (Empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) dengan luas tanah 25.776 m2.

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 bidang dengan nilai sebesar Rp 0.

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m2/Rp 0,- (Nol rupiah).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	25.776	43.475.010.00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 9.219.042.511.- (Sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh dua ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1.431 buah. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 10.262.699.982.- (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dengan total jumlah barang sebanyak 1.425 unit, **mutasi tambah** sebesar Rp 247.365.155.- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), dan **mutasi kurang** sebesar Rp 1.291.013.626.- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah). Pada periode ini terdapat *koreksi pencatatan* atas peralatan dan mesin dengan kode barang 30502 (Alat rumah tangga) berupa sice sebanyak 7 unit dan gordyin/kray 2 unit dengan total 9 unit, senilai Rp 247.365.155.- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah). Koreksi pencatatan tersebut berupa perubahan kondisi barang yang awalnya rusak berat menjadi baik. Dan terdapat **mutasi kurang** dengan kode barang 30201 (Alat angkutan darat bermotor) berupa 3 unit kendaraan roda empat, senilai Rp 1.291.013.626.- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang dihentikan penggunaannya dan telah dilakukan Pemindahtanganan BMN melalui penjualan/lelang.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 2.280.774.026.- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 9 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 2.280.774.026.- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh enam rupiah) dengan jumlah barang sebanyak 9 unit, **mutasi tambah** jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (Nol rupiah) dan **mutasi kurang** sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp 1.291.013.626.- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Mutasi Tambah Barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang Barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
Micro Bus (3020102002)	520.000.000	-
Mini Bus (3020102003)	342.000.000	-
Mobil Unit Panggung (3020105011)	429.013.626	-
Jumlah	1.291.013.626	

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	6	989.760.400
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	3	1.291.013.626
Jumlah	9	2.280.774.026

2) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 3.800.000.- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 3.800.000.- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	3.800.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	2	3.800.000

3) Alat Bengkel Bermesin (3.03.01)

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 6.490.000.- (Enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 6.490.000.- (Enam juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	6.490.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	2	6.490.000

4) Alat Bengkel Tak Bermesin (3.03.02)

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 26.929.090.- (Dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. Jumlah

tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 26.929.090.- (Dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh rupiah) dengan jumlah kuantitas sebanyak 2 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	26.929.090
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	2	26.929.090

5) Alat Ukur (3.03.03)

Saldo Alat Ukur pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 63.970.646.- (Enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 5 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 63.970.646.- (Enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan total jumlah barang sebanyak 5 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	5	63.970.646
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	5	63.970.646

6) Alat Pengolahan (3.04.01)

Saldo Alat Pengolahan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 356.363.350.- (Tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 41 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 356.363.350.- (Tiga

ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan total kuantitas 41 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	41	356.363.350
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	41	356.363.350

7) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 373.173.180.- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 82 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 373.173.180.- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 82 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	82	373.173.180
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	82	373.173.180

8) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 4.312.530.091.- (Empat milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1.170 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 4.065.173.936.- (Empat milyar enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1.161 unit, **mutasi tambah** jumlah barang sebesar Rp 247.356.155 (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus

lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan **mutasi kurang** sebesar Rp 0.- (Nol rupiah).

Pada periode ini terdapat *koreksi pencatatan* atas peralatan dan mesin sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar senilai Rp 247.365.155.- (Dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah). Koreksi pencatatan tersebut berupa perubahan kondisi barang yang semulanya rusak berat menjadi baik dengan rincian berupa sice sebanyak 7 unit dan gordyin/kray 2 unit.

Mutasi Tambah Barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
Alat Rumah Tangga	247.356.155	-

Mutasi Kurang Barang tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
-	-	-

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1.170	4.312.530.091
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	1.170	4.312.530.091

9) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 714.016.100.- (Tujuh ratus empat belas juta enam belas ribu seratus rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 31 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 714.016.100.- (Tujuh ratus empat belas juta enam belas ribu seratus rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 31 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	31	714.016.100
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	31	714.016.100

10) Alat komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 11.199.000.- (Sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 11 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 11.199.000.- (Sebelas juta seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 11 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	11	11.199.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	11	11.199.000

11) Peralatan Pemancar (3.06.03)

Saldo Peralatan Pemancar pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester 1 Tahun 2026 sebesar Rp 1.132.685.000.- (Satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 1.132.685.000.- (Satu miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	1.132.685.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Jumlah	2	1.132.685.000
--------	---	---------------

12) Alat Kedokteran (3.07.01)

Saldo Alat Kedokteran pada BPMP Provinsi Sumatera Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 17.809.000.- (Tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 4 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 17.809.000.- (Tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 4 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	17.809.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	4	17.809.000

13) Alat Kesehatan Umum (3.07.02)

Saldo Alat Kedokteran pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 4.015.000.- (Empat juta lima belas ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 4.015.000.- (Empat juta lima belas ribu rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	4.015.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	1	4.015.000

14) Unit Alat Laboratorium (3.08.01)

Saldo Unit Alat Laboratorium pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 125.891.772.- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus

sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 18 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 125.891.772.- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 18 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	18	125.891.772
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	18	125.891.772

15) Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 461.292.832.- (Empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 32 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar sebesar Rp 461.292.832.- (Empat ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 32 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	32	461.292.832
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	32	461.292.832

16) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 229.000.350.- (Dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 20 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 229.000.350.- (Dua ratus dua puluh

sembilan juta tiga ratus lima puluh rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 20 unit.

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	20	229.000.350
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	20	229.000.350

17) Pengolahan dan Pemurnian (3.13.03)

Saldo Pengolahan dan Pemurnian pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp 390.116.500.- (Tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 390.116.500.- (Tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 2 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	390.116.500
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	2	390.116.500

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada laporan barang kuasa pengguna Semester I Tahun 2026 sebesar Rp -8.074.908.004 (minus delapan milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu empat rupiah).

d. Gedung dan Bangunan (133111)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 55.895.446.223 (Lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga

rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 dengan total jumlah gedung dan bangunan sebanyak 37 dengan nilai sebesar Rp 55.895.446.223 (Lima puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah). **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	35	53.465.684.110
Rusak Ringan	2	2.429.762.113
Rusak Berat	-	-
Jumlah	37	55.895.446.223

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp -13.984.259.614 (minus tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

e. Jalan dan Jembatan (134111)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 141.886.000 (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 141.886.000 (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan luas 490 M2. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	490	141.886.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	490	141.886.000

Akumulasi Penyusutan Jalan dan jembatan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp -141.886.000 (minus seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

f. Irigasi (134112)

Saldo irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 486.856.000 (Empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu) dengan jumlah kuantitas 3 unit. Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 486.856.000 (Empat ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu) dengan jumlah kuantitas 3 unit. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah Irigasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	3	486.856.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	3	486.856.000

Akumulasi Penyusutan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp -180.720.903 (minus seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

g. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 161.851.768 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 3.412. Jumlah tersebut dari saldo awal per 1 Januari 2026 sebesar Rp 161.851.768 (Seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 3.412. **Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang.**

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3.412	161.851.768
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	3.412	161.851.768

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 0. (Nol Rupiah).

h. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 342.000.000-, (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan total kuantitas sebanyak 1 unit. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah adalah berupa 1 unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) merek Toyota Fortuner 2,5 M/G, yang telah dilakukan pemindahtanganan BMN melalui penjualan/lelang. Pelaksanaan lelang BMN dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 bertempat di KPKNL Kota Palembang dengan Nomor Risalah Lelang 202/04.02/2026-01 dan telah dilakukan serah terima BMN kepada pemenang lelang dengan Nomor BAST 1142/B/C6.13/LK.01.03/2026 pada tanggal 8 Juli 2026 dan akan dikeluarkan dari Neraca BMN pada periode bulan Juli 2026. (rincian terlampir).

Rincian BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
1. Tanah	-	-
2. Peralatan dan Mesin	342.000.000	342.000.000
3. Gedung dan Bangunan	-	-

4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5. Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	342.000.000	342.000.000

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp -342.000.000 (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).

Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I TA 2026

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp 87.065.480.785 (Delapan puluh tujuh milyar enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	ASET LANCAR			
1	Persediaan	67.162.804	-	-
	Sub Jumlah (I)	67.162.804	-	-
II	ASET TETAP			
1	Tanah	43.475.010.000	-	-
2	Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	-	-
3	Gedung dan Bangunan	55.895.446.223	-	-
4	Jalan dan Jembatan	141.886.000	-	-
5	Irigasi	486.856.000	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	161.851.768	-	-

7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	342.000.000	-	-
	Sub Jumlah (II)	109.722.092.502	-	-
	TOTAL	109.789.255.306	-	-

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel	Gabungan
	ASET TETAP			
1	Peralatan dan Mesin	- 8.074.908.004	-	-
2	Gedung dan Bangunan	- 13.984.259.614	-	-
3	Jalan dan Jembatan	- 141.886.000	-	-
4	Irigasi	- 180.720.903	-	-
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	- 342.000.000	-	-
	TOTAL	- 22.723.774.521	-	-

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2026 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Saldo Menurut		Selisih
		Aset	GLP	
I	ASET LANCAR			
1	Persediaan	67.162.804	67.162.804	-
	Sub Jumlah (I)	67.162.804	67.162.804	-
II	ASET TETAP			
1	Tanah	43.475.010.000	43.475.010.000	-
2	Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	9.219.042.511	-
3	Gedung dan Bangunan	55.895.446.223	55.895.446.223	-
4	Jalan dan Jembatan	141.886.000	141.886.000	-

5	Irigasi	486.856.000	486.856.000	-
6	Aset Tetap Lainnya	161.851.768	161.851.768	-
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	342.000.000	342.000.000	-
	Sub Jumlah (II)	109.722.092.502	109.722.092.502	-
III	PENYUSUTAN ASET			
1	Peralatan dan Mesin	- 8.074.908.004	- 8.074.908.004	-
2	Gedung dan Bangunan	- 13.984.259.614	- 13.984.259.614	-
3	Jalan dan Jembatan	- 141.886.000	- 141.886.000	-
4	Irigasi	- 180.720.903	- 180.720.903	-
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	- 342.000.000	-	-
	Sub Jumlah (III)	- 22.723.774.521	- 22.723.774.521	-
	TOTAL	87.065.480.785	87.065.480.785	-

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah	43.475.010.000	-
2	Peralatan dan Mesin	9.219.042.511	-
3	Gedung & Bangunan	55.895.446.223	-
4	Jalan dan Jembatan	141.886.000	-
5	Irigasi	486.856.000	-
6	Aset tetap lainnya	161.851.768	-

7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	342.000.000	-
Jumlah		109.722.092.502	-

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a.Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b.Ditolak	-	-	-	-	-
	c.Disetujui	-	-	✓	-	5 (tiket)
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	✓	-	1 (tiket)
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	✓	-	(4 tiket)

7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	✓	-	3 (tiket)
8	Selesai serah terima	-	-	✓	-	(4 tiket)

Penjelasan dari tabel diatas :

Rincian Pengelolaan BMN periode Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

✚ Telah dilakukan Pemindahtanganan BMN dengan total pengajuan sebanyak 4 Tiket permohonan:

1. Pemindahtanganan BMN melalui Hibah berupa 1 unit Micro Bus (3020102001) dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 520.000.000-, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang dengan Nomor Surat S-68/MK/KNL.0402/2026 tentang Persetujuan Hibah BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Februari 2026
- Telah dilakukan serah terima BMN kepada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah pada tanggal 30 Maret 2026 dengan Nomor BAST 0518/B/C6.13/LK.03.01/2026
- Telah ditetapkan SK Penetapan Hibah BMN dengan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026
- Telah dilakukan tindak lanjut pengelolaan melalui SIMAN V2.

2. Pemindahtanganan BMN melalui Penjualan berupa 1 unit Mobil Unit Panggung (3020105011) dengan Nilai Perolehan Rp 429.013.626-, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang dengan Nomor Surat S-110/MK/KNL.0402/2026 tentang Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 April 2026

- Telah terbit Risalah Lelang dengan Nomor 149/04.02/2026-01 tanggal 20 Mei 2026
 - Telah dilakukan serah terima BMN kepada Pemenang Lelang pada tanggal 25 Mei 2026 dengan Nomor BAST 0933/B/C6.13/LK.01.03/2026
 - Telah ditetapkan SK Pemindahtanganan BMN dengan Nomor 44 Tahun 2026 tanggal 2 Juni 2026
 - Telah dilakukan tindak lanjut pengelolaan melalui SIMAN V2.
3. Pemindahtanganan BMN melalui Penjualan berupa Peralatan dan Mesin atau Barang Inventaris dengan Nilai Perolehan Rp 1.094.518.355-, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Telah disetujui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Nomor Surat 9798/B/MDM.A/LK.01.03/2026 tentang persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 7 Mei 2026
 - Telah terbit Risalah Lelang dengan Nomor 165/04.02/2026-01 tanggal 4 Juni 2026
 - Telah dilakukan serah terima BMN kepada Pemenang Lelang pada tanggal 9 Juni 2026 dengan Nomor BAST 0979/B/C6.13/LK.01.03/2026
 - Telah ditetapkan SK Pemindahtanganan BMN dengan Nomor 47 Tahun 2026 tanggal 8 Juni 2026
 - Telah dilakukan tindak lanjut pengelolaan melalui SIMAN V2.

4. Pemindahtanganan BMN melalui Penjualan berupa 1 unit Mini Bus (3020102003) dengan Nilai Perolehan Rp 342.000.0000-, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang dengan Nomor Surat S-171/MK/KNL.0402/2026 tentang persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2026
- Telah terbit Risalah Lelang dengan Nomor 202/04.02/2026-01 tanggal 7 Juli 2026
- Telah dilakukan serah terima BMN kepada Pemenang Lelang pada tanggal 8 Juli 2026 dengan Nomor BAST 1142/B/C6.13/LK.01.03/2026
- Telah ditetapkan SK Pemindahtanganan BMN dengan Nomor 56 Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026
- Telah dilakukan tindak lanjut pengelolaan melalui SIMAN V2.

• Telah dilakukan Permohonan Penetapan Tarif Sewa Tahun 2026 dengan Nomor Tiket PPL26040208560040741, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Telah terbit Persetujuan Sewa BMN berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Surat S-149/MK/KNL.0402/2026 tanggal 26 Mei 2026.
- Terdapat 9 Gedung/Bangunan BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui untuk disewakan pada periode 1 Tahun sejak Persetujuan sewa diterbitkan.



Tajuddin Idris, S.Si, M.T.

DIPA AWAL
TAHUN ANGGARAN 2026



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : SP DIPA- 138.04.2.693243/2026

DS:5901-1009-9898-1938

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (138) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
| 2. Unit Organisasi | : | (04) | DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH |
| 3. Provinsi | : | (11) | SUMATERA SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (693243) | BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN |
| Sebesar | : | Rp. 34.594.822.000 | (TIGA PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNBP
- PNBP TA Berjalan
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Terlampir

Terlampir

Rp.	34.594.822.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

Jumlah Uang

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttid.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026



DS.5901-1009-9899-1938

Satker	: (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN		
10	PENDIDIKAN	Rp.	34.594.822.000
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Rp.	13.343.379.000
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	Rp.	21.251.443.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026



DS.5901-1009-9899-1938

Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp.	13.343.379.000
DI.7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Rp.	13.343.379.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.251.443.000
WA.7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditijen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp.	21.251.443.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:901-1009-9899-1938

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
Provinsi : (11) MENENGAH SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Program	: 138.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		13.343.379.000
Kegiatan	: 7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen		13.343.379.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
	: 2. 02	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7605.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.530,00	Lembaga
Rincian Output	: 01	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Diknas yang difasilitasi penjaminan mutunya	12512,00	Lembaga
	: 02	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	18,00	Lembaga
				913.129.000
Program	: 138.04.WA	Program Dukungan Manajemen		21.251.443.000
Kegiatan	: 7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		21.251.443.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		
	: 2. 02	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output	: 01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Dokumen
	: 02	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan
	: 03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan
				20.901.443.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDas, DAN DIKMen
ttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5901-1009-9899-1938

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	14.939.789	19.655.033	-	-	-	34.594.822		
138.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	13.343.379	-	-	-	13.343.379		
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	-	13.343.379	-	-	-	13.343.379		
7605.QDB	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	13.343.379	-	-	-	13.343.379	11.08	
01 RM		-	13.343.379	-	-	-	13.343.379	014@	
138.04.WA	Program Dukungan Manajemen	14.939.789	6.311.654	-	-	-	21.251.443		
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	14.939.789	6.311.654	-	-	-	21.251.443		
7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	14.939.789	6.311.654	-	-	-	21.251.443	11.08	
01 RM		14.939.789	6.311.654	-	-	-	21.251.443	014	
	JUMLAH	14.939.789	19.655.033	-	-	-	34.594.822		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKAS, DAN DIKMEN
ttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN

Kode>Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI 4	FEBRUARI 5	MARET 6	APRIL 7	MEI 8	JUNI 9	JULI 10	AGUSTUS 11	SEPTEMBER 12	OKTOBER 13	NOVEMBER 14	DESEMBER 15	
1.	693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN													16
138.04.DI.7605		RENCANA PENARIKAN DANA	2.857.906	2.857.906	2.857.906	2.857.906	2.857.906	2.857.906	3.057.906	2.957.906	2.957.906	2.945.436	2.939.436	2.588.800	34.594.822
		BELANJA PEGAWAI	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.245.042	14.939.789
		BELANJA BARANG	1.612.929	1.612.929	1.612.929	1.612.929	1.612.929	1.612.929	1.812.929	1.712.929	1.712.929	1.700.459	1.694.459	1.343.758	19.655.033
		Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.147.983	1.141.983	609.336	13.343.379
138.04.WA.7606		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.160.453	1.147.983	1.141.983	609.336	13.343.379
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.697.453	1.697.453	1.697.453	1.697.453	1.697.453	1.697.453	1.897.453	1.797.453	1.797.453	1.797.453	1.797.453	1.979.464	21.251.443
		51 BELANJA PEGAWAI	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.244.977	1.245.042	14.939.789
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	452.476	452.476	452.476	452.476	452.476	452.476	652.476	552.476	552.476	552.476	552.476	734.422	6.311.654
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	81.000
		- PNBP (425131)	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	81.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDas, DAN DIKMen

ttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
IV A. B L O K I R



DS.5901-1009-9899-1938

Kementerian Negara/Lembaga : [138] KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693243] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		Rp. 113.539
138.04.DI	52 Belanja Barang		Rp. 113.539
7605	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
7605.QDB	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen		
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Rp. 113.539
	Tidak Dapat Dicairkan		
	biaya pendukung tidak sesuai ketentuan maksimal 9% dari pagu output, dialokasikan selektif dan efisi		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN

tttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2026
 NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
 IV B. C A T A N



DS:5901-1009-9899-1938

Kementerian Negara/Lembaga : [138] KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
 Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
 Kode dan Nama Salkes : [693243] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.B. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
 ttd.
 GOGOT SUHARWOTO
 NIP 197102111993011002

DIPA REVISI TERAKHIR

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : SP DIPA- 138.04.2.693243/2026



DS-4406-8546-3840-6655

Revisi ke 10

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (138) | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH |
| 2. Unit Organisasi | : | (04) | DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH |
| 3. Provinsi | : | (11) | SUMATERA SELATAN |
| 4. Kode>Nama Satker | : | (693243) | BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN |
| Sebesar | : | Rp. 25.613.852.000 | (DUA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS TIGA BELAS JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- Rupiah Murni
- PNBP
- PNBP TA Berjalan

- Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN PALEMBANG

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Pelikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

Rp.	25.613.852.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(014) Rp. 25.613.852.000			

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
Plh. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUDARTO
NIP. 196904091989121001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026



DS:4406-8546-3840-6655

Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN			
10	PENDIDIKAN	Rp.	25.613.852.000
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Rp.	6.475.291.000
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	Rp.	19.138.561.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026



DS.4406-8546-3840-6655

Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp.	6.475.291.000
DI.7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Rp.	6.475.291.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	19.138.561.000
WA.7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dijen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp.	19.138.561.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS-4406-8546-3840-6655

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
Provinsi : (11) MENENGAH SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	138.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		6.475.291.000
Kegiatan	:	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen		6.475.291.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		
	:	2. 02	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan		
Klasifikasi Rincian Output	1	7605.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12.530,00	Lembaga
Rincian Output	:	01	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	12512,00	Lembaga (PN)
	:	02	Penda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	18,00	Lembaga (PN)
Program	:	138.04.WA	Program Dukungan Manajemen		19.138.561.000
Kegiatan	:	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		19.138.561.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A		
	:	2. 02	Persentase Satuan Kerja di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik		
Klasifikasi Rincian Output	1	7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Dokumen
	:	02	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan
	:	03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan
					18.960.024.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
I B. SUMBER DANA



DS.4406-8546-3840-6855

Kementerian Negara/Lembaga : (138)
Unit Organisasi : (04)
Provinsi : (11)
Kode/Nama Satker : (693243)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
SUMATERA SELATAN
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Anggaran Tahun 2026		Rp.	25.613.852.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	0	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni		Rp.	25.613.852.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.	0		0
2. PNB		Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.	0		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.	0		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0		0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0		0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0		0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0		0		
(dalam ribuan rupiah)												
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING					
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -							
1	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost			
	2	3	4	5	6	7	8	9				

(dalam ribuan rupiah)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4406-8546-3840-6055

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAUAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	14.939.789	10.674.063	-	-	-	25.613.852		
138.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	-	6.475.291	-	-	-	6.475.291		
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	-	6.475.291	-	-	-	6.475.291		
7605.QDB	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	-	6.475.291	-	-	-	6.475.291	11.08	
01 RM		-	6.475.291	-	-	-			
138.04.WA	Program Dukungan Manajemen	14.939.789	4.198.772	-	-	-	19.138.561	014	
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	14.939.789	4.198.772	-	-	-	19.138.561		
7606.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.08 SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR)	14.939.789	4.198.772	-	-	-	19.138.561	11.08	
01 RM		14.939.789	4.198.772	-	-	-	19.138.561	014	
	JUMLAH	14.939.789	10.674.063	-	-	-	25.613.852		

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKAS, DAN DIKMEN

titid.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:406-8546-3840-6655

Kementerian Negara/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN

Kode/Nama Satker : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1.	693243	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138.04.DI.7605		RENCANA PENARIKAN DANA	914.614	2.837.520	2.748.316	1.679.766	1.704.571	2.812.423	1.996.939	1.882.621	1.911.516	1.806.180	1.675.460	3.643.926	25.613.852
		BELANJA PEGAWAI	520.454	952.185	1.791.416	955.301	968.229	1.815.437	968.229	968.229	968.229	968.229	1.025.618	3.038.234	14.939.789
		BELANJA BARANG	394.160	1.885.335	956.899	724.465	736.342	996.987	1.028.710	914.392	943.287	837.952	649.843	605.692	10.674.063
		Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	268.295	1.763.198	809.581	307.457	319.334	576.107	571.251	374.328	310.163	334.110	372.970	468.498	6.475.291
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	268.295	1.763.198	809.581	307.457	319.334	576.107	571.251	374.328	310.163	334.110	372.970	468.498	6.475.291
138.04.WA.7606		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dikjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	646.319	1.074.322	1.938.735	1.372.309	1.385.237	2.236.316	1.425.688	1.508.293	1.601.353	1.472.071	1.302.491	3.175.428	19.138.561
		51 BELANJA PEGAWAI	520.454	952.185	1.791.416	955.301	968.229	1.815.437	968.229	968.229	968.229	968.229	1.025.618	3.038.234	14.939.789
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	125.865	122.137	147.318	417.008	417.008	420.880	457.459	540.064	633.124	503.842	276.873	137.194	4.198.772
		PERKIRAAN PENERIMAAN	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	81.000
		- PNB (425131)	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	81.000

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKAS, DAN DIKMEN

titd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
IV A. B L O K I R



DS:4406-8546-3840-6655

Kementerian Negara/Lembaga : [138] KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693243] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
ttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 138.04.2.693243/2026
IV B. C A T A N



DS:406-8546-3840-6655

Kementerian Negara/Lembaga : [138] KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Salkes : [693243] BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTUR JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
ttd.
GOGOT SUHARWOTO
NIP 197102111993011002

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN**

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

LAPORAN TRANSAKSI SETOR PNBP - SIMPONI JANUARI - JUNI 2026

No	Nama Wajib Bayar / Setor	Kode Billing	Tanggal Billing	Tanggal Bayar	NTPN	Mata Uang	Jumlah	Status
1	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260127045949	27-01-2026 10:24:35	03-02-2026 08:27:08	DBD278N3F5U7IU9T	IDR	5.516.000	Sudah Dibayar
2	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260208871698	08-02-2026 17:40:01	09-02-2026 06:59:26	A06DA7QLVBE9728I	IDR	3.660.000	Sudah Dibayar
3	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260406707393	06-04-2026 14:15:12	07-04-2026 15:02:19	ACCC03CIG6O7RH61	IDR	7.092.000	Sudah Dibayar
4	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260416256058	16-04-2026 11:06:38	17-04-2026 10:50:32	668E37QLVBKEVU1Q	IDR	7.880.000	Sudah Dibayar
5	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260420716912	20-04-2026 09:33:50	20-04-2026 09:49:44	6AF0A55DFRTE12BG	IDR	1.773.000	Sudah Dibayar
6	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260526098677	26-05-2026 16:06:24	26-05-2026 16:28:02	A8DEA7QLVBNNNO27L	IDR	3.660.000	Sudah Dibayar
7	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260526098593	26-05-2026 16:00:00	26-05-2026 16:21:27	160FA49001E64251	IDR	985.000	Sudah Dibayar
8	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260526098700	26-05-2026 16:08:23	26-05-2026 16:33:32	C7B422G50C9DA28C	IDR	1.000.000	Sudah Dibayar
9	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260610979999	10-06-2026 8:12:16	10-06-2026 9:22:47	F85B649001GN2E4V	IDR	3.546.000	Sudah Dibayar
10	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	820260610984167	10-06-2026 8:18:30	10-06-2026 9:27:53	FFE1561QVMLFSI77	IDR	5.516.000	Sudah Dibayar
Jumlah							40.628.000	

Mengetahui,
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Indralaya, 30 Juni 2026
Bendahara Penerimaan,

Riyan Natalia Zubir, S.Kom.
NIP 197305012002122001



Tahun : 2026
Semester : 1
No./Tgl DIPA :
Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
Provinsi : Sumatera Selatan
Satuan Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan
KPPN : Palembang

Akun	Jenis	Target 2026	Realisasi PNBSP Semester 1						Jumlah	% terhdap Target
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni		
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	82.000.000	0	5.516.000	0	7.092.000	3.660.000	3.546.000	40.628.000	50%
				3.660.000		7.880.000	985.000	5.516.000		
						1.773.000	1.000.000			
Jumlah			-	9.176.000	-	16.745.000	5.645.000	9.062.000	40.628.000	50%

Menggetahui,
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

BALAI PENGEMBANGAN
PUSAT PENDIDIKAN
Tajudin Idris, S.Si., M.T.
NIP.19720319020022021002

Indralaya, 30 Juni 2026
Bendahara Penerimaan

Riyani Natalia Zubir, S.Kom.
NIP.197305012002122001

Tahun : 2026
 Triwulan : I
 Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKODAS, DAN DIKMIN
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Satuan Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan
 KPPN : Palembang

Akun	Jenis	Target 2026	Realisasi PNBP triwulan I			% terhdap Target	Realisasi SSBP Triwulan I			% terhdap Target				
			Januari	Februari	Maret		Januari	No. NTPN	Februari		No. NTPN	Maret	No. NTPN	
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	82.000.000	0	5.516.000	0	11%	0		5.516.000		0			
				3.660.000					3.660.000					
Jumlah		82.000.000	-	9.176.000	-	11%	-		9.176.000		-		9.176.000	11%

Mengisi
 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan



Indralyfa, 11 Maret 2025
 Bendahara Penerimaan

Riyan Nataly Zubir, S.Kom.
 NIP 197305012002122001

Tahun : 2026
 Triwulan : II
 No./Tgl DIPA :
 Lembaga : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Satuan Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan
 KPPN : Palembang

Akun	Jenis	Target 2026	Realisasi PNBK triwulan II				% terhdp Target	Realisasi SSBP Triwulan II				% terhdp Target			
			April	Mei	Juni	Jumlah		April	No. NTPN	Mei	No. NTPN		Juni	No. NTPN	Jumlah
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	82.000.000	7.092.000	3.660.000	3.546.000	31.452.000	38%	7.092.000	ACCC03CIG607RH61	3.660.000	A8DEA7QLVBNNQ27	3.546.000	F85B649001GN2E4V	31.452.000	38%
			7.880.000	985.000	5.516.000			7.880.000	668E37QLVBKEVUIQ	985.000	160FA49001E64251	5.516.000	FFE1561QVMLFSI77		
			1.773.000	1.000.000				1.773.000	6AF0A55DFRTE12BG	1.000.000	C7B422G50C9DA28C				
Jumlah		82.000.000	16.745.000	5.645.000	9.062.000	31.452.000	38%	16.745.000		5.645.000		9.062.000		31.452.000	38%



Indrakya 30 Juni 2025
 Bendahara Penerimaan
 Riyan Natalis Zubir, S.Kom.
 NIP.197305012002122001

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN**

PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2026

Kementerian/Lembaga : (138) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-138.04.2.693243/2026

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (11.08) SUMATERA SELATAN / KAB. OGAN KOMERING ILIR KPPN : (014) Palembang

Satuan Kerja : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 105.000.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00081/SSP/693243/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	298.783.498,00	372.597.664,00	566.381.162,00	105.000.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	298.783.498,00	372.597.664,00	566.381.162,00	105.000.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	298.783.498,00	117.670.850,00	311.454.348,00	105.000.000,00
	1. BP UP*)	105.000.000,00	114.390.272,00	114.390.272,00	105.000.000,00
	2. BP TUP*)	193.783.498,00	0,00	193.783.498,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	3.280.578,00	3.280.578,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	187.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	104.812.686,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	104.999.686,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	105.000.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	104.999.686,00
3. Selisih Kas	Rp.	314,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	105.000.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	105.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	105.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 314,00 karena Tidak ada pecahan uang Rp.314,-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



TAJUDDIN IDRIS
197203302002121002

KAB. OGAN KOMERING ILIR, Juni 2026
Bendahara Pengeluaran



Samsuri
197703212005011002 197703212005011002

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9892256932431000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 105.000.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00081/SSP/693243/2026

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	105.000.000,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	105.000.000,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	105.000.000,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	0,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	105.000.000,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0,00

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	187.000,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	104.812.686,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	104.999.686,00

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 314,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	105.000.000,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	105.000.000,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3	Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	105.000.000,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	105.000.000,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	105.000.000,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)

Rp. 0,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

314,00 karena Tidak ada pecahan uang Rp.314,-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Samsuri

197703212005011002 197703212005011002



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

T. MUDDIN IDRIS

197203302002121002

Dicetak pada tanggal 03 Juli 2026

REKENING KORAN
PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2026



Mutasi Transaksi (01/06/2026 - 30/06/2026)

downloaded at 03/07/2026 10:33:59

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (03)									
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH (baru) (04)									
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN (693243)									
Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DASMEN OPS (1910403066)									
Rekening Satker : BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN (9892256932431000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-30	17:40:41	193395	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050184846 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050184846 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 108,384,881	Rp. 3,572,195	-	Rp. 104,812,686	(TELLER)	(Empty)
2026-06-30	13:59:54	137879	TRANSFER DARI 1910403066 260140000041048000001 14000004104800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 104,812,686	-	Rp. 3,572,195	Rp. 108,384,881	(SPAN)	(Empty)
2026-06-29	12:56:10	612967	TRANSFER DARI 1910403066 260140000040864000001 14000004086400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 74,932,686	-	Rp. 29,880,000	Rp. 104,812,686	(SPAN)	(Empty)
2026-06-29	12:56:10	612953	TRANSFER DARI 1910403066 260140000040863000001 14000004086300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 37,680,639	-	Rp. 37,252,047	Rp. 74,932,686	(SPAN)	(Empty)
2026-06-29	12:56:10	612940	TRANSFER DARI 1910403066 260140000040862000001 14000004086200000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 10,488,129	-	Rp. 27,192,510	Rp. 37,680,639	(SPAN)	(Empty)
2026-06-29	11:17:33	117808	TRANSFER DARI 1910403066 260140000040861000001 14000004086100000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 3,538,129	-	Rp. 6,950,000	Rp. 10,488,129	(SPAN)	(Empty)
2026-06-18	14:13:49	763882	TARIK TUNAI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 58,464,943	Rp. 54,926,814	-	Rp. 3,538,129	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (03)

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH (baru) (04)

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN (693243)

Rekening Induk : RKK DITJEN PAUD DASMEN OPS (1910403066)

Rekening Satker : BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN (9892256932431000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-11	10:56:14	309153	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050184846 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050184846 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 68,008,463	Rp. 9,543,520	-	Rp. 58,464,943	(TELLER)	(Empty)
2026-06-09	14:22:13	633204	TARIK TUNAI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN opr	Rp. 168,008,463	Rp. 100,000,000	-	Rp. 68,008,463	(TELLER)	(Empty)
2026-06-08	14:40:38	593031	TARIK TUNAI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN OPE	Rp. 268,008,463	Rp. 100,000,000	-	Rp. 168,008,463	(TELLER)	(Empty)
2026-06-05	16:12:43	535257	TRANSFER DARI 1910403066 260140000035530000001 14000003553000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 267,175,713	-	Rp. 832,750	Rp. 268,008,463	(SPAN)	(Empty)
2026-06-05	15:15:18	420700	TRANSFER DARI 1910403066 260140000035529000001 14000003552900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 260,199,093	-	Rp. 6,976,620	Rp. 267,175,713	(SPAN)	(Empty)
2026-06-05	12:52:12	517892	TRANSFER DARI 1910403066 260140000035531000001 14000003553100000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9892256932431000 BPG 014 BPMP SUMATERA SELATAN	Rp. 258,464,943	-	Rp. 1,734,150	Rp. 260,199,093	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 268,042,529	Rp. 114,390,272	Rp. 104,812,686		

SURAT KEPUTUSAN
TARIF BMN TAHUN 2026



Nomor : S-149/MK/KNL.0402/2026
Tanggal 26 Mei 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
u.p.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Lintas Sumatera Km. 36, Kel. Indralaya Mulia, Kec. Indralaya,
Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0678/B/C6.13/LK.01.02/2026 tanggal 8 April 2026 hal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara dan Tiket Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) Nomor PPL26040208560040741, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.6/2024 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan, dengan perincian tarif sewa dan periodesitas sewa sebagaimana terlampir. Tarif sewa tersebut berlaku untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal keputusan pelaksanaan sewa.
2. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke Rekening Kas Negara. Pembayaran menggunakan kode *billing* yang diterbitkan melalui Aplikasi SIMAN V2, dengan kode Mata Anggaran Penerimaan 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan). Bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.
3. Dalam hal pihak penyewa terlambat melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka penyewa wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan dengan waktu paling lama s.d. 24 bulan, dihitung sejak tanggal perjanjian sewa dan ditetapkan menggunakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Perjanjian sewa paling sedikit memuat informasi dasar perjanjian, para pihak yang terikat dalam perjanjian, identitas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, peruntukan sewa/jenis usaha, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, hak dan kewajiban para pihak, berakhirnya masa sewa, objek sewa harus dikembalikan dengan baik dan layak pada saat sewa berakhir, klausul perubahan perjanjian (addendum) sewa, hal-hal lain yang perlu diatur dalam perjanjian sewa, serta sanksi.
5. Permohonan perpanjangan jangka waktu sewa harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke Rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui menu rekam tindak lanjut pada Aplikasi SIMAN V2 paling lambat 7 hari kerja, sejak perjanjian sewa ditandatangani.
7. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar dilakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan R.I.
2. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C Lantai 1 – 2, Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang 30129
Telepon (0711) 352574, Laman www.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang a.n. Menteri Keuangan
Nomor : S-149/MK/KNL.0402/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Lokasi	Luas Sewa (m ²)	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Periode	Informasi Tanah	Catatan
1	E12D75B49FFF 876EE0531261 F20A8AB0	4010109001	2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	RAYA LINTAS TIMUR KM 36 INDRALAYA, INDRALAYA, INDRALAYA, RAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	400	1 Tahun	3.660.000	Per Hari	2010104001 - 2 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
2	E12D75B4A000 876EE0531261 F20A8AB0	4010109999	1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	INDRALAYA, INDRALAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	800	1 Tahun	3.373.000	Per Hari	2010104001 - 2 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
3	E12D75B49FFF 876EE0531261 F20A8AB0	4010110001	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		100	1 Tahun	613.000	Per Hari	2010104001 - 2 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari

No	Kode Register	Kode Barang	INUP	Nama BMN	Lokasi	Luas Sewa (m ²)	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Periode	Informasi Tanah	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138041100693243000KD/BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN											
4	E12D75B49FF7 876EE0531261 F20A8AB0	4010110001	5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		100	1 Tahun	613.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
5	E12D75B4A00D 876EE0531261 F20A8AB0	4010110001	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	RAYA LINTAS TIMUR KM 36 INDRALAYA, INDRALAYA, INDRALAYA, RAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	72	1 Tahun	550.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
6	E12D75B4A00D 876EE0531261 F20A8AB0	4010110001	8	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	RAYA LINTAS TIMUR KM 36 INDRALAYA, INDRALAYA, INDRALAYA, RAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	72	1 Tahun	550.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
7	E12D75B49FF2 876EE0531261 F20A8AB0	4010205001	1	A s r a m a Permanen	JL. RAYA LINTAS TIMUR KM. 36, INDRALAYA, INDRALAYA, RAYA, KAB. IDRALAYA, SUMATERA SELATAN, 30862	24	1 Tahun	203.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Lokasi	Luas Sewa (m²)	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Periode	Informasi Tanah	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138041100693243000KD/BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN											
8	E12D75B4A005 876EE0531261 F20A8AB0	4010205001	2	A s r a m a Permanen	RAYA LINTAS TIMUR KM 36 INDRALAYA, INDRALAYA, INDRALAYA RAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	30	1 Tahun	203.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari
9	E12D75B49FF1 876EE0531261 F20A8AB0	4010205001	3	A s r a m a Permanen	INDRALAYA, INDRALAYA, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, 30862	24	1 Tahun	203.000	Per Hari	2010104001 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	nilai sewa per hari

a.n. Menteri Keuangan

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto



**SURAT KEPUTUSAN
PEJABAT PERBENDAHARAAN
DAN PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN 2026**



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEJABAT PERBENDAHARAAN LAINNYA DAN
STAF PPK/PENGELOLA KEUANGAN/PPABP
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026
KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya yang meliputi Pembuat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Staf PPK Sebagai pengelola Keuangan di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu di tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Staf PPK Sebagai Pengelola Keuangan/PPABP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

- Mengingat :
- 1 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - 3 Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25767/MDM.A/KU.00.00/2025 Tentang Pejabat Perbedaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

- 4 Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan No.1915/C7.13/KP.11.00/2025 Tentang Penetapan Tim Kerja di BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- 5 DIPA BPMP Sumatera Selatan Tahun 2026;
- 6 Program kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Pengelola Keuangan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026..
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Staf PPK Sebagai Pengelola Keuangan/PPABP di BPMP Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Kedua : Agar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2026
KEPALA



H. TAJUDDIN IDRIS, S.Si, M.T

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 34 Tahun 2026
Tanggal : 9 April 2026
Tentang : Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Staf PPK sebagai Pengelola
Keuangan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

**PEJABAT PERBENDAHARAAN LAINNYA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA, NIP	JABATAN DINAS	JABATAN PERBENDAHARAAN LAINNYA
1	H. Tajuddin Idris, S.Si, M.T. NIP 197203302002121002	Kepala	KPA / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	M.A. Fainaludin, S.Ag., MM. NIP 197105311991031001	Widyaprada Ahli Muda	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	Sukamto, SE, MM NIP 1974062005011001	JF PPBJ Ahli Muda	Pejabat Pengadaan

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2026
KEPALA



H. TAJUDDIN IDRIS, S.Si, M.T

Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 34 Tahun 2026

Tanggal : 9 April 2026

Tentang : Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Staf PPK sebagai Pengelola Keuangan/PPABP
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

**STAF PPK/ PENGELOLA KEUANGAN
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA, NIP	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Ahmad Riduan, S.E., M.Acc. NIP 198007172002121005	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf PPK (Pengelola Keuangan)
2	Indri Armita, S.HUM NI PPPK 198407172008101001	Penata Layanan Operasional	Staf PPK (Pengelola Keuangan)
3	Edy Pramono, S.Sos NIP 198407172008101001	Pengadministrasi Perkantoran	Staf PPK (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai)

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 April 2026
KEPALA



H. TAJUDDIN IDRIS, S.Si, M.T



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862
Laman <https://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 0073 /C7.13/KP.04.00/2026**

TENTANG

**PEJABAT PERBENDAHARAAN LAINNYA DAN
STAF PPK/PENGELOLA KEUANGAN/PPABP
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026
KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu ditetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya yang meliputi Pembuat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Staf PPK Sebagai pengelola Keuangan di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu di tetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Staf PPK Sebagai Pengelola Keuangan/PPABP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

- Mengingat :
- 1 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
 - 3 Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 25767/MDM.A/KU.00.00/2025 Tentang Pejabat Perbedaharaan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026
 - 4 Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan No.1915/C7.13/KP.11.00/2025 Tentang Penetapan Tim Kerja di BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
 - 5 DIPA BPMP Sumatera Selatan Tahun 2026;
 - 6 Program kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Pengelola Keuangan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026..
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Staf PPK Sebagai Pengelola Keuangan/PPABP di BPMP Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Kedua : Agar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala



H. H. Idris, S.Si, M.T.
NIP 197203302002121002

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 0013/C7.13/KP.04.00/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Staf PPK sebagai Pengelola Keuangan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

**PEJABAT PERBENDAHARAAN LAINNYA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA, NIP	JABATAN DINAS	JABATAN PERBENDAHARAAN LAINNYA
1	Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si NIP 197808252002122002	Penelaah Teknis Kebijakan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	M. A. Fainaludin, S.Ag., MM. NIP 197105311991031001	Widyaprada Ahli Muda	Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	Sukamto, SE, MM NIP 1974062005011001	JF PPBJ Ahli Muda	Pejabat Pengadaan

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala



H. Tajuddin Idris, S.Si, M.T.
NIP 197203302002121002

Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 0013 /C7.13/KP.04.00/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

Tentang : Pejabat Perbendaharaan Lainnya dan Staf PPK sebagai Pengelola Keuangan/PPABP
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

**STAF PPK/ PENGELOLA KEUANGAN
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA, NIP	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
1	Ahmad Riduan, S.E., M.Acc. NIP 198007172002121005	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf PPK (Pengelola Keuangan)
2	Indri Armita, S.HUM NI PPPK 198407172008101001	Penata Layanan Operasional	Staf PPK (Pengelola Keuangan)
3	Edy Pramono, S.Sos NIP 198407172008101001	Pengadministrasi Perkantoran	Staf PPK (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai)

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2026
Kepala



H. Tajuddin Idris, S.Si, M.T
NIP 197203302002121002

DOKUMEN LELANG
TAHUN 2026



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KENDARAAN RODA EMPAT BG 115 TZ
Nomor : 1142/B/C6.13/LK.01.03/2026**

Pada hari ini, rabu, tanggal delapan, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.
NIP : 19820909200912006
Jabatan : Kasubbag Umum BPMP Provinsi Sumatera Selatan / Pejabat Penjual
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU (yang menyerahkan)
2. Nama : Ridwhan Prianggono
Pekerjaan : Wiraswasta/Peserta Lelang (Pembeli)
Alamat : Panggang AM VIII 004/000 Argomulyo Sedayu Kab Bantul, DIY
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima)

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dari **PIHAK PERTAMA** Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit Kendaraan Roda Empat Merek Toyota, Tipe Fortune 2.5 G M/T, Model Jeep, Nomor Polisi BG 115 TZ, Nomor Rangka MHFZR69GB3030398, Nomor Mesin 2KD-6916820, Warna Abu Abu Metalik, Tahun Pembuatan 2011. Sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 202/04.02/2026-01 tanggal 07 Juli 2026.

Demikian berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,



an. Dani Ramdani (Pemenang Lelang)

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

An.  Tedi

Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala,

Tajuddin Idris, S.Si., M.T.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : 1142/B/C6.13/LK.01.03/2026

Tanggal : 08 Juli 2026

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Perolehan/Tahun Pembuatan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Nilai Pokok Lelang (Rp)	Keterangan / Nama dan Jabatan Pembeli Non Lelang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	E12D75D6	3020102003	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA,FO RTUNE.2.5G M/T	1 Unit	2011 / 2011	342.000.000	75.155.000	131.655.000	Ridwan Pranggono
	5016										
	88E2E0531										
	261										
	F20AA804										
JUMLAH								342.000.000	75.155.000	131.655.000	

Yang Menerima
Pihak Kedua,

[Signature]

an. Dani Randani

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

[Signature]

an. Bar Pen, S.H., M.A.P.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
INVENTARIS / PERALATAN DAN MESIN**

Nomor : 0979/B/C6.13/LK.01.03/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.
NIP : 19820909200912006
Jabatan : Kasubbag Umum BPMP Provinsi Sumatera Selatan / Pejabat Penjual
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU (yang menyerahkan)
2. Nama : Dul Kalim
NIK : 3276012310790002
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Peserta Lelang (Pembeli)
Alamat : Taman Induk RT 04 RW 011
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima)

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dari **PIHAK PERTAMA** Barang Milik Negara (BMN) berupa satu paket barang inventaris/peralatan dan mesin. Sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 165/04.02/2026-01 tanggal 04 Juni 2026.

Demikian berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,



Dul Kalim

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

An

Tedi Rahman, ST.

Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.



Mengetahui/Mengesahkan
Kepala,

Tajudin Idris, S.Si., M.T.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : 0979/B/C6.13/LK.01.03/2026

Tanggal : 9 Juni 2026

No	Nama BMN	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Nilai Pokok Lelang (Rp)	Keterangan / Nama dan Jabatan Pembeli Lelang
1	2	3	4	5	6	7
1	Inventaris / Peralatan dan Mesin	2.660 Unit	1.094.518.355	8.286.999	26.186.999	Dul Kalim Buruh Harian Lepas
Jumlah			1.094.518.355	8.286.999	26.186.999	

Yang Menerima
Pihak Kedua,


Dul Kalim

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,


Jim Bar Pen S.H., M.A.P.



Mengetahui/Mengesahkan
Kepala,


Fauddin Idris, S.Si., M.T.



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KENDARAAN RODA EMPAT BG 8071 TZ
Nomor : 0933/B/C6.13/LK.01.03/2026**

Pada hari ini, senin, tanggal dua puluh lima, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.
NIP : 19820909200912006
Jabatan : Kasubbag Umum BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU (yang menyerahkan)
2. Nama : Harjono
Pekerjaan : Perangkat Desa/Peserta Lelang (Pembeli)
Alamat : Pendukuhan IX 035/018 Krembangan Panjatan Kulon Progo DIY
Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (yang menerima)

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dari **PIHAK PERTAMA** Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit Kendaraan Roda Empat Merek Isuzu, Tipe Del Van NKR 71 E2, Model Truck Delivery Van, Nomor Polisi BG 8071 TZ, Nomor Rangka MHCNK71LYJ007695, Nomor Mesin B007695, Warna Merah Kombinasi, Tahun Pembuatan 2007. Sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 149/04.02/2026-01 tanggal 20 Mei 2026.

Demikian berita acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,



Dohi PERINATA
an. Harjono (Pemenang Lelang)

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

Jim Bar Pen, S.H., M.A.P.

Mengetahui/Mengesahkan



Tajuddin Idris, S.Si., M.T.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : 0933/B/C6.13/LK.01.03/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Pembuatan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Pokok Lelang (Rp)	Keterangan / Nama dan Jabatan Pembeli Lelang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138041100693243000KD / BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN										
1	E12D75D65017 88E2E0531261 F20AA804	3020105011	1	Mobil Unit Panggung	ISUZU, NKR 71 E2	1 Unit	2007	429.013.626	137.513.000	Harjono Perangkat Desa
JUMLAH								429.013.626	137.513.000	

Yang Menerima
Pihak Kedua,

Doni Perantara
an. Harjono (Pemenang Lelang)

Yang Menyerahkan
Pihak Pertama,

Jim Bar Pen. S.H., M.A.P.



DOKUMEN HIBAH
TAHUN 2026



Nomor : 0476/B/C6.13/LK.01.03/2026

Indralaya, 25 Februari 2026

Hal : Pengantar Permohonan Pemindahtanganan BMN
berupa kendaraan

Kepada Yth:

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Palembang

Jalan Kapten A. Rivai No. 4

Di Palembang

Dengan hormat, sesuai dengan PMK No 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, Pemindahtanganan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara tepat dan akuntabel, bersama dengan surat ini kami Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dengan cara hibah, adapun kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Data calon penerima hibah
- b. Surat permintaan hibah dari calon penerima hibah
- c. Surat pernyataan bersedia menerima hibah dari calon penerima hibah
- d. Daftar BMN yang akan diusulkan pemindahtanganan melalui hibah
- e. Dokumen kepemilikan
- f. Kartu Identitas Barang (KIB)
- g. Foto Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan pemindahtanganan melalui hibah
- h. Surat Keputusan Pembentukan Tim Panitia Pemindahtanganan

Demikian permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Tajuddin Idris, S.Si., M.T.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-68/MK/KNL.0402/2026 26 Februari 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan

Yth. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan
Jalan Lintas Sumatera Nomor Km. 36, Desa Indralaya Mulia, Kec. Indralaya,
Kab. Ogan Ilir

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan Nomor 0476/B/C6.13/LK.01.03/2026 tanggal 25 Februari 2026 hal Pengantar Permohonan Pemindahtanganan BMN dan Tiket Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) Nomor PPL26022311280031776 tanggal 26 Februari 2026, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan hibah Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit Microbus (penumpang 15 s.d 29 orang), dengan nilai perolehan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan persetujuan hibah ini, agar ditetapkan dengan keputusan mengenai jenis, jumlah dan nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan.
2. Pelaksanaan hibah dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Selatan dan Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Selatan, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan Pengelola Barang.
3. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna, dan penghapusan dimaksud didasarkan pada Surat Keputusan Pengguna Barang, Paling lama 2 (dua) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
4. Laporan pelaksanaan hibah yang dilampiri Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan keputusan penghapusan, agar disampaikan kepada Menteri Keuangan R.I. c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang selaku Pengelola Barang, paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan ditandatangani, melalui Aplikasi SIMAN V2.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan, serta calon penerima hibah tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palembang



Ditandatangani secara elektronik
Mardhanus Rudiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan R.I.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, DJKN
5. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
6. Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumatera Selatan



Gedung Keuangan Negara Palembang Blok C Lantai 1 – 2, Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang 30129
Telepon (0711) 352574, Laman www.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Palembang a.n. Menteri
Keuangan
Nomor : S-68/MK/KNL.0402/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138041100693243000KD/BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN										
1	E12D75D6500D 88E2E0531261 F20AA804	3020102002	1	Micro Bus (Penumpang 15 S/ D 29 Orang)	H I N O, WU342R- HKMRJD3BL	1	2013	520.000.000	Baik	Hanif El Islam, S.Pd. MM.
JUMLAH								520.000.000		

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik
Mardhanus Rudiyanto



**BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA
PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH SUMATERA SELATAN**

Nomor : 0518/B/C6.13/LK.03.01/2026

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan maret tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 nama : Tajuddin Idris, S.Si.,M.T.
 NIP : 19720330 200212 1 002
 jabatan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
 Sumatera Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2 nama : Hanif El Islam, S.Pd, M.M.
 NBM : 774.151
 jabatan : Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;
4. Keputusan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang penetapan mengenai jenis, jumlah, dan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang akan dihibahkan kepada Pimpinan Wilayah Aisyiyah Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 30 Maret 2026;
5. Persetujuan hibah Barang Milik Negara (BMN) pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dari Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang nomor S-68/MK/KNL.0402/2026 tanggal 26 Februari 2026 ;
6. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah nomor 021/PWA/A/II/2026 tanggal 24 Februari 2026.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Penyerahan ini dilakukan atas dasar permohonan hibah dari Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang nomor S-68/MK/KNL.0402/2026 tanggal 26 Februari 2026.

PASAL 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU** berupa satu unit kendaraan micro bus dengan nilai perolehan sebesar Rp 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

PASAL 3

PIHAK KEDUA wajib mencatat dan mengelola Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai aset milik PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggungjawab dan kepemilikan terhadap satu unit kendaraan micro bus beralih dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.

PASAL 5

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Pimpinan Wilayah
Aisyiyah Sumatera Selatan



HANIF EL ISLAM, S.Pd.M.M.

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan



TAJUDDIN IDRSI, S.Si.M.T.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Nomor : 0518/B/C6.13/LK.03.01/2026

Tanggal : 30 Maret 2026

No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138041100693243000KD / BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN										
1	E12D75D6500D 88E2E0531261 F20AA804	3020102002	1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	HINO WU342R- HKMRJD3BL	1 Unit	2013	520.000.000	Baik	Hanif El Islam, S.Pd. MM.
JUMLAH								520.000.000		

PIHAK KEDUA

Kepala Pimpinan Wilayah
Kesyahidatan Sumatera Selatan


HANIF EL ISLAM, S.Pd.M.M.

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan


ABU MUHAMMAD IDRSI, S.Si.M.T.



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN)
ANTARA
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH SUMATERA SELATAN
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 0 5 3 8 /B/C6.13/LK.03.01/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tajuddin Idris, S.Si., M.T.
NIP : 197203302002121002
Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memberikan hibah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Hanif El Islam, S. Pd., MM.
NBM : 774.151
Jabatan : Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan memperhatikan:

1. Permohonan hibah dari Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan yang diajukan kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan nomor : 020/PWA/A/II/2026 tanggal 23 Februari 2026;
2. Surat Menteri Keuangan R.I c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang Nomor : S-68/MK/KNL.0402/2026, tanggal 26 Februari 2026 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka melaksanakan Surat Persetujuan Hibah tersebut diatas sesuai ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 88/P/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku Pengguna Barang Milik Negara dalam Bentuk Mandat kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor III/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor III/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU. Barang Milik Negara (BMN) yang akan digunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan berupa Micro Bus sebagaimana terlampir dalam lampiran Perjanjian ini kepada Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan yang terletak di Jln. Balayudha KM. 4,5 Balayudha Palembang 30128 Telp./Fax. 413082 Email : aisyyah2023sumsel@gmail.com Sumatera Selatan, yang saat ini Barang Milik Negara tersebut tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Hibah ini bertujuan untuk kepentingan kegiatan supervisi dan pembinaan lembaga pendidikan 'Aisyiyah, koordinasi program dengan pemerintah daerah dan mitra kerja, kegiatan sosial, dakwah dan pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil dan mendukung kegiatan pelatihan, workshop dan peningkatan mutu pendidikan.

PASAL 2

Jumlah barang yang akan digunakan adalah satu (1) unit kendaraan berupa Micro Bus pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya Mulya, Indralaya, Ogan Ilir sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, yang selanjutnya akan disebut sebagai OBJEK HIBAH.

PASAL 3

PIHAK KESATU menerangkan dan menyatakan bahwa sumber hibah adalah Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

PASAL 4

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan adalah pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH.

PASAL 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan aset berpindah dari Barang Milik Negara (BMN) pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan menjadi Barang Milik Swasta pada Pimpinan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan.
- b. PIHAK KEDUA mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- c. PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan pemindahtanganan pemilik OBJEK HIBAH kepada pihak lain.
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hibah atas Barang Milik Negara (BMN) tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

PASAL 6

1. PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.

2. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- b. Menjamin bahwa OBJEK HIBAH adalah benar milik PIHAK KESATU dan bebas dari ikatan apapun serta bebas dari beban dan kewajiban pihak lain;
- c. Menghapus OBJEK HIBAH dari daftar Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang.

PASAL 7

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK KESATU;
- b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menginventaris OBJEK HIBAH;
- b. Mempertgunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
- c. Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KESATU;
- d. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan pengambilan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya;
- e. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH pada PIHAK KESATU.
- f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah ini;
- g. Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain;
- h. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH;
- i. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah; dan
- j. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Naskah Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani PIHAK KEDUA belum ada upaya untuk mengoperasikan OBJEK HIBAH.

PASAL 9

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini;
- b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah ini; dan
- c. Naskah Perjanjian Hibah ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan NASKAH PERJANJIAN HIBAH ini.

PASAL 10

PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya.

PASAL 11

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 12

1. Naskah Perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima Barang, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 14

1. Setiap Pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Naskah Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
 - a. Disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - b. Dikirim dengan surat tercatat.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya Mulya, Indralaya, Ogan Ilir, 30862
Tembusan : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
 - b. PIHAK KEDUA
Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan
Alamat : Jln. Balayudha KM. 4,5 Balayudha Palembang 30128 Telp./Fax. 413082
Email : aisyyah2023sumsel@gmail.com Sumatera Selatan
Tembusan : Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Selatan
3. Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - a. Pada tanggal tanda terima ditanda tangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; atau
 - b. Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirimkan dengan surat tercatat.

4. Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
5. Jika pemberitahuan dimaksud pada ayat 4 tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

PASAL 15

1. Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
2. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara (BMN) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah
Sumatera Selatan



HANIF EL ISLAM, S.Pd.M.M.

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan



GAJUDDIN IDRSI, S.Si.M.T.

**LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA (BMN) ANTARA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN PIMPINAN WILAYAH 'AISYIAH SUMATERA SELATAN**

Nomor : 0538/B/C6.13/LK.03.01/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

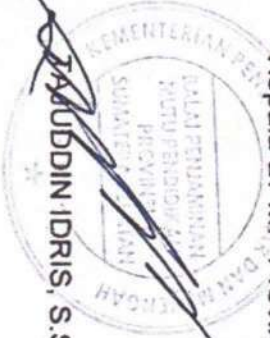
No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Type	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138041100693243000KD / BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN										
1	E12D75D6500D 88E2E0531261 F20AA804	3020102002	1	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	H I N O, WU342R- HKMRJD3BL	1 Unit	2013	520.000.000	Baik	Hanif El Islam, S.Pd. MM.
JUMLAH								520.000.000		

PIHAK KEDUA
Ketua Pimpinan Wilayah
'Aisyiyah Sumatera Selatan



HANIF EL ISLAM, S.Pd.M.M.

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan



JAUDIDIN IDRIS, S.Si.M.T.

**CAPAIAN
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
TAHUN 2026**

LAPORAN KINERJA 2026

Periode Juni 2026

KEMENTERIAN : 138 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
ESELON I : 13804 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
SATUAN KERJA 693243 BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanggal 27-07-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
CODE PN 04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas							
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	6,028,459,000	3,846,408,614	63.8 %	12,512	7,871	62.9 %	Lembaga
751	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	446,832,000	99,895,335	22.4 %	18	9	50 %	Lembaga

**CAPAIAN RINCIAN OUTPUT
PER FUNGSI
TAHUN 2026**

LAPORAN KINERJA 2026

Periode Juni 2026

KEMENTERIAN : 138 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
ESELON I : 13804 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
SATUAN KERJA 693243 BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanggal 27-07-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
KODE FUNGSI 10	PENDIDIKAN							
KODE SUB FUNGSI 10.02	PENDIDIKAN DASAR							
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6,475,291,000	3,946,303,949	60.9 %	-	-	-	-
750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	6,028,459,000	3,846,408,614	63.8 %	12,512	7,871	62.9 %	Lembaga
751	Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	446,832,000	99,895,335	22.4 %	18	9	50 %	Lembaga
KODE SUB FUNGSI 10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA							
WA	Program Dukungan Manajemen	19,138,561,000	9,285,175,848	48.5 %	-	-	-	-
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD,	19,138,561,000	9,285,175,848	48.5 %	-	-	-	-
EBA	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	19,138,561,000	9,285,175,848	48.5 %	-	-	-	-
956	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,500,000	0	0 %	1	0	0 %	Dokumen
962	Layanan BMN	171,037,000	16,386,000	9.6 %	1	0	0 %	Layanan
994	Layanan Umum	18,960,024,000	9,268,789,848	48.9 %	1	0	0 %	Layanan

**TELAAH
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
SEMESTER 1 TAHUN AANGGARAN 2026**

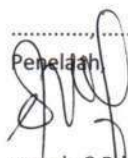
Kode dan Nama K/L : (693243) BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNB		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak

6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		←	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
1	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	✓		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		✓	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya			Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓	✗	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?			Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya			Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP			Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB			Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)			Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya			Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"			Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?			Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya

TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang			Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)			Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya/Tidak Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya/Tidak Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya/Tidak Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan,</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL, () NIP		 samak, S.Pd. NIP 197711152003121004		

**SURAT PENGANTAR
LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER 1 TAHUN 2026
(PERIODE BERAKHIR 30 JUNI 2026)**



SURAT PENGANTAR

Nomor: /B/C6.13/KU.03.02/2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN 014)

Di Palembang

Bersama ini kami sampaikan:

NO	Jenis Dokumen/Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Keuangan Semester 1 Periode 30 Juni 2026 Satuan Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan (kode Satker 693243).	1 (satu) Berkas	Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester 1 Periode 30 Juni 2026 Satuan Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan (kode Satker 693243).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 25 Juli 2026

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Tajuddin Idris, S.Si., M.T.

